

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

2.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Provinsi Sumatera Utara terletak di antara 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai 71.680,68 km² atau 3,72% dari luas Wilayah Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat.

Batas wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi Provinsi Aceh di sebelah Utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan, Samudera Hindia di sebelah Barat, serta Selat Malaka di sebelah Timur. Letak geografis Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran Internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand.

2.1.2. Topografis

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0-12% seluas 65,51% seluas 8,64% dan di atas 40% seluas 24,28%, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 112.920 ha atau 1,57%.

Berdasarkan topografinya, Sumatera Utara dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km² atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga cenderung semakin padat karena arus migrasi dari wilayah Pantai Barat dan dataran tinggi. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 km² atau 65,23% dari luas wilayah Sumatera Utara, yang sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

2.1.3. Iklim

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Kelembaban udara rata-rata 78%-91%, curah hujan (800-4000) mm/ tahun dan penyinaran matahari 43%.

2.1.4. Batas Administrasi

Wilayah Sumatera Utara berada pada jalur perdagangan internasional, dekat dengan dua negara Asean, yaitu Malaysia dan Singapura serta diapit oleh 3 (tiga) provinsi, dengan batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

2.1.5. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan

Seiring dengan laju perkembangan pemekaran wilayah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara yang begitu pesat, sampai tahun 2008 jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara telah bertambah jumlahnya menjadi 28 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 7 kota, 383 kecamatan, desa kelurahan 5736 dengan ibukota provinsinya di Kota Medan dengan luas 265 km² dan jumlah penduduk 2.083.156 jiwa.

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	Nias	32	443
2.	Mandailing Natal	22	376
3.	Tapanuli Selatan	11	511
4.	Tapanuli Tengah	19	172
5.	Tapanuli Utara	15	243
6.	Toba Samosir	14	192
7.	Labuhan Batu	22	242
8.	Asahan	13	176
9.	Simalungun	31	351
10.	Dairi	15	169
11.	Karo	17	262
12.	Deli Serdang	22	394
13.	Langkat	20	260
14.	Nias Selatan	8	214
15.	Humbang Hasundutan	10	144
16.	Pakpak Bharat	8	52
17.	Samosir	9	117
18.	Serdang Bedagai	17	243
19.	Batubara	7	100
20.	Padang Lawas Utara	8	379
21.	Padang Lawas	9	303
22.	Sibolga	4	17
23.	Tanjungbalai	6	31
24.	Pematangsiantar	7	43

2.2. Perekonomian Daerah

Secara umum perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada periode 2002-2007 menunjukkan keadaan terus membaik/meningkat, seperti sektor pertanian, listrik dan air minum, bangunan, perdagangan, dan sektor lainnya.

2.2.1. Struktur Perekonomian

Pada tahun 2006, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Asahan masih merupakan kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara. Kota Medan memberikan dukungan sebesar 30,57% disusul Kabupaten Deli Serdang 13,62% dan Kabupaten Asahan sebesar 10,40%, sedangkan kabupaten/kota lainnya juga memberikan kontribusi tetapi dalam jumlah persentase yang relatif kecil. Kabupaten Labuhan Batu sebesar 7,85%, Kabupaten Langkat sebesar 5,99%, Kabupaten Simalungun sebesar 4,28%, Kabupaten Tapanuli Selatan 2,54%, Kabupaten Karo sebesar 2,49%, Kota Binjai sebesar 1,81%, Kota Pematangsiantar sebesar 1,79%, Kabupaten Nias memberikan kontribusi sebesar 1,69%, Kabupaten Dairi sebesar 1,60%, Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 1,51%, Kabupaten Mandailing Natal sebesar 1,41%, Kabupaten Toba Samosir sebesar 1,30%, Kota Tanjungbalai sebesar 1,23%, Kabupaten Nias Selatan sebesar 0,97%, Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0,96%, Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 0,90%, Kota Tebing Tinggi sebesar 0,89%, Kota Padangsidimpuan sebesar 0,82%, Kota Sibolga sebesar 0,58% dan Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 0,13%.

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mencapai 5,48%, dan pada tahun 2006 sebesar 6,20% dengan PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.160,38 Triliun. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara telah mencapai sebesar 6,90% dengan PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp.181,82 Triliun (angka sementara), dan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,39%.

Tabel 2.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2000
2005-2007 (%)

No	Kabupaten	2005	2006	2007
1	Nias	-3,33	4,65	6,74
2	Mandailing Natal	5,86	6,12	6,46
3	Tapanuli Selatan	3,38	5,79	4,39
4	Tapanuli Tengah	5,36	5,50	6,67
5	Tapanuli Utara	5,04	5,44	6,03
6	Toba Samosir	4,95	5,17	5,77
7	Labuhan Batu	4,14	5,33	6,71
8	Asahan	2,63	4,17	4,89
9	Simalungun	3,11	4,76	5,31
10	Dairi	5,34	4,28	5,03
11	Karo	4,70	4,96	5,13
12	Deli Serdang	4,97	5,45	5,74
13	Langkat	3,47	2,88	4,91
14	Nias Selatan	-2,12	3,99	4,83
15	Humbang Hasundutan	5,65	5,77	6,05
16	Pakpak Bharat	5,92	5,66	5,79
17	Samosir	3,42	3,64	4,59
18	Serdang Bedagai	5,91	6,22	6,25
19	Batubara	¹⁾	¹⁾	4,01

20	Padang lawas utara	2)	2)	2)
21	Padang lawas	2)	2)	2)
22	Sibolga	4,01	5,22	5,53
23	Tanjungbalai	4,11	3,54	4,01
24	Pematangsiantar	5,77	5,96	5,12
25	Tebing Tinggi	4,39	5,33	5,98
26	Medan	6,98	7,76	7,78
27	Binjai	5,28	5,32	5,68
28	Padangsidempuan	4,91	5,49	6,18
	Sumatera Utara	5,48	6,20	6,90

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan :

1) Masih bergabung dengan Kabupaten Asahan

2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

2.2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.2.3.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2006 sebesar Rp.160,03 triliun. Sektor industri pengolahan masih sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai 25,74%, selanjutnya diikuti oleh sektor Pertanian (22,18%) dan sektor Perdagangan, Hotel dan restoran (18,96%), sementara sektor-sektor lain hanya memberikan total kontribusi sebesar 33,12% terhadap perekonomian Sumatera Utara.

Untuk melihat produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi), maka digunakan PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB Sumatera Utara pada tahun 2006 sebesar Rp. 93,33 triliun. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 11,91%, diikuti oleh Sektor Bangunan sebesar 10,33% dan sektor Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan sebesar 9,87%. Secara keseluruhan Perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2006 naik sebesar 6,18%, jika dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB perkapita Sumatera Utara tahun 2006 sebesar Rp. 12.653.504. Sementara berdasarkan harga konstan 2000, PDRB perkapita tahun 2006 sebesar Rp. 7.381.671.

Selanjutnya, berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB Sumatera Utara pada tahun 2007 sebesar Rp.99,79 triliun. Secara keseluruhan Perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2007 bertumbuh sebesar 6,90%, jika dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB perkapita Sumatera Utara tahun 2007 sebesar Rp. 14.17 juta. Sementara berdasarkan harga konstan 2000, PDRB perkapita tahun 2007 sebesar Rp. 7,76 juta.

2.2.3.2. PDRB Menurut Penggunaan

Untuk menggambarkan bagaimana penggunaan barang dan jasa oleh berbagai golongan konsumen, maka digunakan PDRB menurut penggunaan. Pada tahun 2005, dari Rp. 139,62 triliun, nilai barang dan jasa di Sumatera Utara sebagian besar dikonsumsi oleh rumah tangga, yaitu mencapai Rp. 74,44 triliun (53,32%). Selanjutnya untuk ekspor netto sebesar Rp. 24,26 triliun (17,38%), pembentukan modal tetap brutto sebesar Rp. 22,59 triliun (16,18%), konsumsi Pemerintah sebesar Rp. 11,81 triliun (8,46%) dan untuk konsumsi lembaga nirlaba sebesar Rp. 652,10 milyar (0,47%).

Pada tahun 2006, dari Rp. 160,03 triliun, nilai barang dan jasa di Sumatera Utara sebagian besar dikonsumsi oleh rumah tangga, yaitu mencapai Rp. 87,07 triliun (54,41%). Selanjutnya untuk ekspor netto sebesar Rp.28,92 triliun (18,07%), pembentukan modal tetap brutto sebesar Rp. 24,60 triliun (15,37%), konsumsi Pemerintah sebesar Rp. 14,59 triliun (9,12%) dan untuk konsumsi lembaga nirlaba sebesar Rp. 713,17 milyar (0,45%).

Tabel 2.3.
Produk Domestik Regional Brutto Kabupaten / Kota se Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2006 - 2007

KABUPATEN/KOTA	PDRB ATAS HARGA BERLAKU (Miliar Rupiah)		PDRB ATAS HARGA DASAR / KONSTAN 2000 (Miliar Rupiah)	
	2006	2007	2006	2007
1. Nias	2.761,71	3.179,89	1.629,56	1.739,48
2. Mandailing Natal	2.260,84	2.603,79	1.583,39	1.685,70
3. Tapanuli Selatan	4.219,35	4.598,18	2.734,61	2.854,60
4. Tapanuli Tengah	1.449,33	1.610,43	940,15	1.002,82
5. Tapanuli Utara	2.418,46	2.729,50	1.299,38	1.377,74
6. Toba Samosir	2.121,11	2.415,65	1.423,05	1.505,13
7. Labuhan Batu	12.593,78	14.371,16	7.384,24	7.879,42
8. Asahan	17.479,31	8.182,56	10.689,88	4.671,01
9. Simalungun	6.881,62	7.647,49	4.580,01	4.823,35
10. Dairi	2.552,75	2.860,20	1.704,13	1.789,80
11. Karo	3.978,80	4.483,32	2.729,61	2.869,74
12. Deli Serdang	21.459,07	26.053,71	11.598,33	12.364,17
13. Langkat	9.885,08	11.455,32	5.889,03	6.178,02
14. Nias Selatan	1.551,65	1.692,40	1.040,37	1.090,67
15. Humbang Hasundutan	1.535,58	1.726,74	807,46	856,29
16. Pak-pak Bharat	207,59	230,91	130,09	137,62
17. Samosir	1.196,46	1.287,46	868,59	908,46
18. Serdang Bedagai	5.684,32	6.429,01	3.590,14	3.814,43
19. Batubara	1)	11.368,71	1)	6.486,75
20. Padang Lawas Utara	2)	2)	2)	2)
21. Padang Lawas	2)	2)	2)	2)
22. Sibolga	826,27	1.075,26	591,08	623,78
23. Tanjungbalai	1.763,00	2.229,50	1.181,69	1.229,07
24. Pematangsiantar	2.556,77	3.094,56	1.645,11	1.729,27
25. Tebing Tinggi	1.255,43	1.610,17	923,20	978,41
26. Medan	42.792,45	55.455,58	27.234,45	29.352,92
27. Binjai	2.494,69	3.311,30	1.613,44	1.705,07
28. Padangsidimpuan	1.141,15	1.514,26	742,04	787,93
Sumatera Utara	139.618,31	181.819,74	93.347,40	99.792,27

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : PDRB Sumatera Utara bukan merupakan penjumlahan dari PDRB Kabupaten/Kota PDRB Sumatera Utara dan PDRB Kabupaten/Kota masing-masing dihitung secara terpisah

1) Masih bergabung dengan Kabupaten Asahan

2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

Tabel 2.4.
Produk Domestik Regional Brutto Kabupaten / Kota se Provinsi Sumatera Utara
Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Tahun 2006 - 2008 (Target)

KABUPATEN/ KOTA	PDRB ATAS DASAR BERLAKU (Miliar Rupiah)			PDRB ATAS HARGA KONSTAN 2000 (Miliar Rupiah)		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1. Nias	2.761,71	3.179,89	3.196,09	1.629,56	1.739,48	1.828,85
2. Mandailing Natal	2.260,84	2.603,79	2.924,04	1.583,39	1.685,70	1.790,69
3. Tapanuli Selatan	4.219,35	4.598,18	5.441,55	2.734,61	2.854,60	3.073,85
4. Tapanuli Tengah	1.449,33	1.610,43	1.865,71	940,15	1.002,82	1.051,82
5. Tapanuli Utara	2.418,46	2.729,50	3.165,33	1.299,38	1.377,74	1.470,64
6. Toba Samosir	2.121,11	2.415,65	2.879,73	1.423,05	1.505,13	1.629,81
7. Labuhan Batu	12.593,78	14.371,16	16.268,99	7.384,24	7.879,42	8.412,79
8. Asahan	17.479,31	8.182,56	23.091,69	10.689,88	4.671,01	11.762,13
9. Simalungun	6.881,62	7.647,49	9.170,87	4.580,01	4.823,35	5.166,00
10. Dairi	2.552,75	2.860,20	3.388,67	1.704,13	1.789,80	1.952,81
11. Karo	3.978,80	4.483,32	5.466,38	2.729,61	2.869,74	3.047,28
12. Deli Serdang	21.459,07	26.053,71	29.533,88	11.598,33	12.364,17	13.440,96
13. Langkat	9.885,08	11.455,32	12.552,59	5.889,03	6.178,02	6.648,75
14. Nias Selatan	1.551,65	1.692,40	2.093,87	1.033,422	1.016,63	1.082,04
15. Humbang Hasundutan	1.535,58	1.726,74	1.995,86	807,460	857,15	912,29
16. Pakpak Bharat	207,59	230,91	299,04	130,087	143,63	153,28
17. Samosir	1.196,46	1.287,46	1.592,96	868,588	934,56	996,55
18. Serdang Bedagai	5.684,32	6.429,01	7.447,16	3.590,139	3.806,57	4.064,39
19. Sibolga	¹⁾	11.368,71	1.185,75	589,398	630,06	672,84
20. Batubara	¹⁾	11.368,71	¹⁾	¹⁾	6.486,75	¹⁾
21. Padang Lawas Utara	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾
22. Padang Lawas	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾
23. Tanjungbalai	826,27	1.075,26	2.574,52	1.181,685	1.285,99	1.378,46
24. Pematangsiantar	2.865,618	3.412,71	3.932,45	1.748,627	1.868,15	2.007,10
25. Tebing Tinggi	1.417,741	1.572,20	1.798,46	923,315	983,44	1.051,59
26. Medan	48.922,904	55.217,72	63.879,81	27.236,127	29.603,96	32.245,65
27. Binjai	2.889,991	3.152,98	3.626,82	1.613,444	1.740,13	1.866,20
28. Padangsidempuan	1.318,274	1.414,29	1.613,19	742,011	794,29	851,03
Sumatera Utara	160.033,72	194.140,91	210.985,41	93.330,108	107.584,54	108.727,57

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : PDRB Sumatera Utara bukan merupakan penjumlahan dari PDRB Kabupaten/Kota PDRB Sumatera Utara dan PDRB Kabupaten/Kota masing-masing dihitung secara terpisah
 1) Masih bergabung dengan Kabupaten Asahan
 2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

2.2.4. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita pada tahun 2005 berdasarkan atas harga berlaku sebesar Rp. 11.326.516 meningkat menjadi 14.166.626 pada tahun 2007.

Tabel 2.5.
PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Berlaku
2005 - 2007 (Rupiah)

No	Kabupaten	2005	2006	2007
1	Nias	5.482.325	6.247.937	7.185.412
2	Mandailing Natal	5.179.346	5.464.263	6.235.284
3	Tapanuli Selatan	5.869.857	6.705.768	7.214.960
4	Tapanuli Tengah	4.573.080	4.866.083	5.264.173
5	Tapanuli Utara	8.412.454	9.430.734	10.348.813
6	Toba Samosir	11.947.356	12.542.335	14.268.535
7	Labuhan Batu	11.471.610	12.757.621	14.268.640
8	Asahan	15.417.671	16.830.434	12.093.552
9	Simalungun	7.574.084	8.180.743	9.036.067
10	Dairi	8.816.326	9.538.398	10.641.435
11	Karo	11.647.499	11.615.077	12.759.625
12	Deli Serdang	12.191.491	13.131.921	15.449.620
13	Langkat	8.721.307	9.750.050	11.149.662
14	Nias Selatan	5.060.626	5.725.088	6.223.340
15	Humbang Hasundutan	9.022.291	10.052.446	11.224.495
16	Pak-pak Bharat	5.456.927	5.961.444	5.962.684
17	Samosir	8.400.675	9.156.947	9.812.566
18	Serdang Bedagai	8.602.475	9.385.791	10.391.898
19	Batubara	1)	1)	30.410.948
20	Padang Lawas Utara	2)	2)	2)
21	Padang Lawas	2)	2)	2)
22	Sibolga	9.313.593	10.242.151	11.536.266
23	Tanjungbalai	11.536.909	12.606.793	13.940.310
24	Pematangsiantar	11.092.900	11.682.694	13.078.887
25	Tebing Tinggi	9.253.513	10.266.712	11.550.000
26	Medan	21.015.995	23.629.967	26.620.947
27	Binjai	10.486.444	11.831.812	13.338.251
28	Padangsidimpuan	6.429.077	7.262.703	8.179.367
	Sumatera Utara	11.326.516	12.684.532	14.166.626

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : PDRB Sumatera Utara bukan merupakan penjumlahan dari PDRB Kabupaten/Kota

PDRB Sumatera Utara dan PDRB Kabupaten/Kota masing-masing dihitung secara terpisah

1) Masih bergabung dengan Kabupaten Asahan

2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

Tabel 2.6.
PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Konstan 2000
2005 - 2007 (Rupiah)

No	Kabupaten	2005	2006	2007
1	Nias	3.524.455	3.686.636	3.930.595
2	Mandailing Natal	3.864.014	3.826.922	4.036.725
3	Tapanuli Selatan	4.124.559	4.346.092	4.479.129
4	Tapanuli Tengah	3.148.611	3.156.520	3.278.022
5	Tapanuli Utara	4.809.865	5.066.911	5.223.677
6	Toba Samosir	8.527.447	8.414.648	8.890.383
7	Labuhan Batu	7.365.989	7.480.311	7.823.209
8	Asahan	10.017.609	10.293.037	6.903.598
9	Simalungun	5.292.447	5.444.628	5.699.142
10	Dairi	6.254.208	6.367.513	6.658.987
11	Karo	8.224.137	7.968.385	8.167.326
12	Deli Serdang	7.007.613	7.097.625	7.272.541
13	Langkat	5.898.438	5.808.584	6.013.173
14	Nias Selatan	3.471.119	3.838.639	4.010.626
15	Humbang Hasundutan	4.989.924	5.285.913	5.566.235
16	Pak-pak Bharat	3.564.234	3.735.792	3.553.778
17	Samosir	6.394.266	6.647.601	6.923.956
18	Serdang Bedagai	5.746.192	5.927.942	6.165.679
19	Batubara	1)	1)	17.351.871
20	Padang Lawas Utara	2)	2)	2)
21	Padang Lawas	2)	2)	2)
22	Sibolga	6.331.930	6.428.893	6.692.413
23	Tanjungbalai	7.468.769	7.551.912	7.684.976
24	Pematangsiantar	6.735.841	6.989.419	7.308.632
25	Tebing Tinggi	6.460.242	6.691.874	7.018.280
26	Medan	12.411.650	13.174.001	14.090.280
27	Binjai	6.439.516	6.605.547	6.868.205
28	Padangsidempuan	3.963.041	4.080.163	4.256.038
	Sumatera Utara	7.130.696	7.383.039	7.775.393

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : PDRB Sumatera Utara bukan merupakan penjumlahan dari PDRB Kabupaten/Kota
PDRB Sumatera Utara dan PDRB Kabupaten/Kota masing-masing dihitung secara terpisah

1) Masih bergabung dengan Kabupaten Asahan

2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

2.2.5. Laju Inflasi

Pada tahun 2006 Tingkat Inflasi terendah dialami oleh Kota Sibolga (5,03%) dan Tingkat Inflasi tertinggi dialami oleh Kota Padangsidempuan (10,02%). Pada tahun 2007 Tingkat Inflasi terendah dialami oleh Kota Padangsidempuan (5,87%) dan Tingkat Inflasi tertinggi dialami oleh Kota Pematangsiantar (8,37%).

Tabel 2.7.
Tingkat Inflasi 2003-2007, Menurut Kabupaten/Kota (Dalam Persen)

TINGKAT INFLASI (%)						
No.	KABUPATEN/KOTA	T A H U N				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	MEDAN	4,46	6,64	22,91	5,97	6,42
2.	SIBOLGA	3,94	6,64	22,39	5,03	7,13
3.	PADANGSIDEMPUAN	4,07	8,99	18,87	10,02	5,87
4.	PEMATANGSIANTAR	2,51	7,31	19,67	6,06	8,37
5.	SUMATERA UTARA	4,23	6,80	22,41	6,11	6,60

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

2.2.6. Nilai Tukar Petani

Pada tahun 2003 indeks harga yang diterima petani (IT) Sumatera Utara mencapai 569,1, indeks harga yang dibayar Petani (IB) mencapai 572,3 dan nilai tukar petani (NTP) mencapai 99,5%. Pada tahun 2004 indeks harga yang diterima petani (IT) Sumatera Utara mencapai 663,2, indeks harga yang dibayar petani (IB) mencapai 631,8 dan nilai tukar petani (NTP) mencapai 104,9%. Pada tahun 2005 indeks harga yang diterima petani (IT) Sumatera Utara mencapai 464,7, indeks harga yang dibayar petani (IB) mencapai 489,9 dan nilai tukar petani (NTP) mencapai 94,9%. Sedangkan pada tahun 2006, indeks harga yang diterima petani (IT) Sumatera Utara mencapai 526,4, indeks harga yang dibayar petani (IB) mencapai 565,4 dan nilai tukar petani (NTP) mencapai 93,1%.

Pada tahun 2007, nilai tukar petani (NTP) turun menjadi 93,0%, namun demikian ada tahun 2009 NTP ditargetkan akan melampaui 100.

2.2.7. Ekspor dan Impor

Sejalan dengan meningkatnya perekonomian, volume ekspor juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 volume ekspor Sumatera Utara mencapai 8.700.000 ton. Sedangkan Nilai ekspor Sumatera Utara pada tahun yang sama mencapai 5.523.090 juta dolar Amerika. Pada tahun 2005 Volume Ekspor Sumatera Utara mencapai 8.174.804 ton dan Nilai Ekspor sebesar 4.563.075 juta dolar Amerika. Pada tahun 2004 Volume Ekspor Sumatera Utara mencapai 7.512.890 ton dan Nilai Ekspor sebesar 4.239.409 juta dolar Amerika. Pada tahun 2003 Volume Ekspor Sumatera Utara mencapai 5.490.113 ton dan Nilai Ekspor sebesar 2.687.877 juta dolar Amerika, serta tahun 2009 ditargetkan volume ekspor mencapai 9,08 juta ton dengan nilai sebesar 4,93 milyar US\$.

Sementara itu, pada tahun 2006 Volume Impor Sumatera Utara mencapai 4.400.000 ton dan Nilai Impor Sumatera Utara mencapai 1.456.990 juta dolar Amerika. Pada tahun 2005 Volume Impor Sumatera Utara mencapai 3.717.119 ton dan Nilai Impor sebesar 1.178.006 juta dolar Amerika. Pada tahun 2004 Volume Impor Sumatera Utara mencapai 3.221.856 ton dan Nilai Impor sebesar 953.359 juta dolar Amerika. Pada tahun 2003 Volume Impor Sumatera Utara mencapai 2.343.112 ton dan Nilai Impor sebesar 679.881 juta dolar Amerika, serta tahun 2009 ditargetkan volume impor sebesar 3,94 juta ton dengan nilai 1,72 milyar US\$.

2.3. Sosial Budaya Daerah

2.3.1. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2003, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara berjumlah 11.890.399 jiwa, terdiri dari 5.942.682 laki-laki dan 5.947.717 perempuan, dengan kepadatan rata-rata 166 Jiwa/km². Sekitar 56,75% penduduk bertempat tinggal di pedesaan dan 43,25% bertempat tinggal di daerah perkotaan.

Pada tahun 2007, penduduk Provinsi Sumatera Utara bertambah jumlahnya menjadi 12.834.371 jiwa yang terdiri dari 6.381.870 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 49,72% dan 6.452.501 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 50,28%, dengan kepadatan rata-rata 179 Jiwa/Km².

2.3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990 - 2000 adalah 1,20% pertahun, dan pada tahun 2000 - 2005 menjadi 1,35% pertahun. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi antara tahun 2000 - 2005 terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 2,96% pertahun, hal ini kemungkinan karena letak Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai daerah transit bagi Kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten Nias dan Tapanuli Selatan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah ada di Kabupaten Toba Samosir, yang tercatat sebesar negatif 0,96% pertahun. Berdasarkan struktur usia keseluruhan terdiri dari 33,68% berusia di bawah 15 tahun; 42,06% wanita usia subur dan 18,17% usia di atas 45 tahun (termasuk 3,3% di atas 64 tahun).

2.3.3. Struktur Usia

Berdasarkan struktur usia, secara keseluruhan penduduk Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33,68% berusia di bawah 15 tahun; 42,06% wanita usia subur dan 18,17% usia di atas 45 tahun (termasuk 3,3% di atas 64 tahun).

Penduduk Provinsi Sumatera Utara dilihat dari segi usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kelompok Umur
Tahun 2007

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Laki - Laki + Perempuan
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	699.900	674.400	1.374.300
5-9	681.400	663.500	1.344.900
10-14	713.600	695.500	1.409.100
15-19	706.600	682.600	1.389.200
20-24	655.100	637.500	1.292.600
25-29	554.300	566.500	1.120.800
30-34	454.000	492.300	946.300
35-39	405.100	439.400	844.500
40-44	373.000	394.400	767.400
45-49	332.100	340.300	672.400
50-54	267.700	266.300	534.000
55-59	188.700	189.200	377.900
60-64	126.100	136.200	262.300
+65	224.300	274.400	498.700
Total (Pembulatan)	6.381.870	6.452.501	12.834.371

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

2.3.4. Indikator Sosial

2.3.4.1. Pendidikan

Kondisi Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dapat kita lihat terlebih dahulu dari segi sarana yang ada yakni jumlah sekolah. Di tingkat pendidikan dasar, jumlah sekolah pada tahun 2007 ada sebanyak 9.691 unit dengan jumlah guru 80.180 orang dan murid sebanyak 1.831.250 orang. Untuk tahun 2007 jumlah sekolah menengah tingkat pertama (SMTP) ada sebanyak 1.844 sekolah dengan jumlah guru 33.069 orang dan jumlah murid ada sebanyak 912.662 orang. Jumlah sekolah menengah tingkat atas (SMTA/SMK) ada sebanyak 1.237 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing 60.816 orang dan 725.488 siswa.

Kondisi pada pendidikan tinggi dapat kita lihat dengan semakin meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) pada tahun 2005 adalah sebanyak 252 PTS, yang terdiri dari 32 universitas, 112 sekolah tinggi, 3 institut, 94 akademi, dan 11 politeknik. Jumlah perguruan tinggi swasta pada tahun 2006 adalah sebanyak 268 PTS, yang terdiri dari 33 universitas, 114 sekolah tinggi, 3 institut, 107 akademi, dan 11 politeknik.

Perluasan akses pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sumatera Utara, untuk tahun 2007 sebesar 5,52. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah tingkat melek huruf, dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun memperkecil prosentase buta aksara ini, tahun 2007 sebesar 3,01. Keberhasilan pendidikan tidak saja memperhatikan perluasan akses pendidikan, namun tidak kalah pentingnya adalah terciptanya pemerataan akses pendidikan, dalam hal ini dapat kita lihat dari persentase disparitas APK SD/MI/SDLB antara kabupaten dan kota, yakni tahun 2007 sebesar 2,22.

Salah satu trend yang makin berkembang dewasa ini adalah yang menyangkut kesetaraan gender, dalam hal Pemerataan Akses Pendidikan dapat dilihat dari semakin kecilnya jarak disparitas gender yang ada, misalnya Persentase Disparitas Gender APK pada jenjang pendidikan menengah tahun 2007 sebesar 17,01.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami kemajuan dalam aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan, serta peningkatan mutu PAUD, walaupun masih di bawah rata-rata Nasional (45,63%). Pencapaian sasaran PAUD tersebut terbukti dari peningkatan perluasan akses PAUD yang ditandai peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 12,00% pada tahun 2006.

2.3.4.2. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit merupakan faktor utama dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Jumlah rumah sakit yang ada di Sumatera Utara tahun 2006 terjadi penambahan menjadi 29 rumah sakit pemerintah dan pengurangan menjadi 102 rumah sakit swasta.

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan Umum (BPU) dan Posyandu Sementara sarana kesehatan tingkat kecamatan dan perdesaan cukup banyak di Sumatera Utara. Puskesmas di Sumatera Utara tahun 2006 sebanyak 449 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 1.937 unit, BPU sebanyak 888 unit dan Posyandu sejumlah 13.001 unit.

Tenaga medis kesehatan di Sumatera Utara jumlahnya terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah dokter umum di Sumatera Utara tahun 2003 terdapat sebanyak 973 orang, dokter gigi sebanyak 307 orang, dokter spesialis sebanyak 399 orang. Pada tahun 2004 terdapat dokter umum sebanyak 1.018 orang, dokter gigi sebanyak 411 orang, dokter spesialis sebanyak 383 orang, sedangkan tenaga medis bidan tersedia sebanyak 10.246 orang dan perawat sebanyak 8.197 orang.

Di tahun 2005 terjadi peningkatan jumlah tenaga dokter umum sebanyak 1.301 orang, dokter gigi sebanyak 475 orang dan dokter spesialis sebanyak 405 orang, sedangkan tenaga medis bidan berkurang menjadi sebanyak 7.142 orang dan perawat sebanyak 6.794 orang. Demikian

halnya pada tahun 2006 terjadi penambahan jumlah dokter umum menjadi sebanyak 1.328 orang, dokter gigi menjadi 510 orang, dokter spesialis menjadi 423 orang dan tenaga medis perawat menjadi 8.368 orang, sedangkan tenaga medis bidan berkurang menjadi 6.410 orang.

Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007 sebesar 68,68 tahun. Bila dibandingkan dengan angka nasional yaitu 68,23 tahun pada tahun 2007, Provinsi Sumatera Utara berada di atas angka nasional.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya telah mengalami penurunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Menurunnya AKB dari 36/1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2004 menjadi 34,2/1.000 Kelahiran Hidup (KLH) pada tahun 2005, pada tahun 2006 menjadi 33,5/1.000 KLH, mengalami penurunan kembali pada tahun 2007 menjadi 32,5/1.000 KLH.

AKB ini menggambarkan status kesehatan/gizi ibu selama hamil yang rendah, kondisi wanita pada umumnya, kondisi lingkungan dan masih belum memadainya tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, melahirkan dan menyusui. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sumatera Utara selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 330/100.000 KLH pada tahun 2004, menjadi 320/100.000 KLH, pada tahun 2006 menjadi 315/100.000 Kelahiran Hidup (KLH), kembali mengalami penurunan sebesar 305/100.000 KLH pada tahun 2007.

2.3.4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 2.9.
Data IPM Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota
tahun 2007

NO.	KABUPATEN/KOTA	IPM
1.	Nias	66,8
2.	Mandailing Natal	69,4
3.	Tapanuli Selatan	72,5
4.	Tapanuli Tengah	69,5
5.	Tapanuli Utara	72,6
6.	Toba Samosir	75,2
7.	Labuhan Batu	72,0
8.	Asahan	70,7
9.	Simalungun	71,7
10.	Dairi	71,3
11.	Karo	73,5
12.	Deli Serdang	73,2
13.	Langkat	71,5
14.	Nias Selatan	64,5
15.	Humbang Hasundutan	70,5
16.	Pakpak Bharat	69,1

17.	Samosir	72,8
18.	Serdang Bedagai	71,5
19.	Batubara	70,4
20.	Padang Lawas Utara	--
21.	Padang Lawas	--
22.	Sibolga	73,7
23.	Tanjungbalai	71,9
24.	Pematangsiantar	75,9
25.	Tebing Tinggi	75,0
26.	Medan	75,6
27.	Binjai	75,3
28.	Padangsidempuan	73,6
	Sumatera Utara	72,5

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

2.3.4.4. Distribusi Penduduk berdasarkan Wilayah Pembangunan

Distribusi penduduk Provinsi Sumatera Utara berdasarkan wilayah pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Pantai Timur dengan luasnya 24.921,99 km² (34,77%). Pada tahun 2003, jumlah penduduk 7.378.654 jiwa (62,06%), kepadatan ± 296 jiwa/km². Pada tahun 2007, jumlah penduduk 8.020.815 jiwa (62,49%), kepadatan ± 322 Jiwa/km².
2. Wilayah Dataran Tinggi luasnya 20.569,62 km² (28,70%). Pada tahun 2003, jumlah penduduk 2.321.900 jiwa (19,53%), kepadatan ± 113 Jiwa/km². Pada tahun 2007, jumlah penduduk 2.459.901 Jiwa (19,17%), kepadatan ± 120 jiwa/km².
3. Wilayah Pantai Barat dengan luas 26.189,07 km² (36,54%). Pada tahun 2003, jumlah penduduk 2.189.845 jiwa (18,42%), kepadatan ± 84 jiwa/km². Pada tahun 2007, jumlah penduduk 2.353.655 jiwa (18,34%), kepadatan ± 90 jiwa/km².

2.3.4.5. Suku Bangsa

Penduduk Sumatera Utara terdiri dari berbagai suku, yaitu Melayu, Batak, Nias, Aceh, Minangkabau, Jawa dan telah beragama. Walaupun berbeda agama dan adat istiadat, kehidupan bersama berlangsung rukun dan damai dengan Pancasila sebagai pedoman hidup.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 7 etnis asli serta 5 etnis pendatang yang tersebar pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. Adapun distribusi penduduk berdasarkan suku bangsa di daerah Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10.
Jumlah dan Persentase Suku/Etnis Asli di Sumatera Utara

NO.	SUKU ETNIS ASLI	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE (%)
1.	Melayu	674.122	5,86
2.	Karo	585.173	2,04

3.	Simalungun	234.515	2,04
4.	Tapanuli/Toba	2.948.264	25,62
5.	Mandailing	1.296.518	11,27
6.	Pakpak	83.866	0,73
7.	Nias	731.620	6,36
8.	Lainnya	2.261.916	21,39

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.11.
Jumlah dan Persentase Suku/Etnis Pendatang di Sumatera Utara

NO.	SUKU ETNIS PENDATANG	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE (%)
1.	Jawa	3.843.602	33,40
2.	Minangkabau	306.550	2,66
3.	Cina	311.779	2,71
4.	Aceh	111.686	0,97
5.	Lainnya (warga negara asing)	379.113	3,24

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

2.3.4.6. Agama

Jumlah dan persentase penduduk menurut agama yang dianut di daerah Sumatera Utara yaitu pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12.
Jumlah dan Persentase Pemeluk Agama di Sumatera Utara

NO.	AGAMA	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE (%)
1.	Islam	7.530.839	65,45
2.	Katolik	550.456	4,78
3.	Protestan	3.062.965	26,62
4.	Hindu	21.329	0,19
5.	Budha	324.864	2,82
6.	Lainnya	1.343.918	10,48

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

2.4. Sarana dan Prasarana Daerah

Dalam upaya mendukung kegiatan mencapai kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyediakan sarana dan prasarana seperti perhubungan darat, laut dan udara, sistim irigasi, penerangan listrik (PLN) dan pelayanan air bersih. Di samping pembangunan pada sektor-sektor tersebut di atas, kegiatan pengembangan wilayah juga menjadi bagian dari penyediaan prasarana dan sarana. Pengembangan wilayah mencakup upaya mengatur penggunaan ruang untuk fungsi-fungsi seperti kantong produksi pertanian, pertambangan, permukiman, perindustrian, area pelayanan yang berhubungan dengan transportasi laut, udara, maupun darat, wilayah perdagangan, pusat pertumbuhan, dan untuk tujuan pelestarian baik flora, fauna dan sistim tata air. Agar tujuan pengembangan wilayah dapat dicapai secara optimal, keseimbangan lingkungan hidup harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam melaksanakan suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana ini diharapkan sebagai salah satu parameter yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian di Sumatera Utara.

2.4.1. Pekerjaan Umum

2.4.1.1. Jalan / Jembatan

Tabel 2.13.
Kondisi eksiting jaringan jalan nasional
di Sumatera Utara tahun 2008

No	JALAN LINTAS	PANJANG RUAS (KM)	MANTAP (KM)		TIDAK MANTAP (KM)	
			BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1.	Lintas Timur	484,12	139,14	203,08	183,15	3,75
2.	Lintas Tengah	487,25	49,42	76,04	148,70	213,09
3.	Lintas Barat	441,63	51,58	115,40	43,65	231,00
4.	Lintas Diagonal	601,94	161,88	231,13	105,58	103,40
5.	Metropolitan	83,05	17,95	62,55	2,55	0
	Jumlah	2.098,05	419,97	688,20	438,63	551,24
			1.108,17		989,87	

Sumber : Dinas Jalan dan Jembatan Provsu

Dari Uraian tersebut dapat disebutkan Kerusakan Jalan Nasional (Tidak Mantap) ± 989,87 Km (47,18).

Tabel 2.14.
Kondisi eksiting jaringan jalan provinsi dan kabupaten/kota
di Sumatera Utara tahun 2008

No	KONDISI JALAN	PROVINSI (KM)	KABUPATEN/ KOTA (KM)
1.	Mantap	1.875,21	15.973,81
2.	Tidak Mantap	877,20	11.203,47
	T O T A L	2.752,41	27.177,28
	Persentase Kerusakan	31,87	41,22

Sumber : Dinas Jalan dan Jembatan Provsu

2.4.1.2. Pengelolaan Sumber Air, Kondisi Irigasi, dan Sungai

Pengelolaan Sumber daya air mencakup pengelolaan sumber daya air yang ketersediaannya terbatas, menjaga kualitas air, konservasi danau, dan menjaga ketersediaan sumber air, dan pengendalian banjir agar pembangunan yang dibutuhkan dan kehidupan dapat berlanjut secara berkesinambungan.

Kondisi pengelolaan sumber daya air di Sumatera Utara dapat diilustrasikan secara umum sebagai berikut :

Berdasarkan pengamatan khususnya pada kualitas sumber daya air di Provinsi Sumatera Utara terjadi penurunan kualitas. Hal ini di indikasikan dari hasil pemantauan Bapedalda Provinsi Sumatera Utara terhadap kualitas air Sungai Deli, menunjukkan bahwa 70% penurunan kualitas air Sungai Deli disebabkan oleh limbah domestik rumah tangga. Kondisi yang sama dapat juga terjadi pada sungai-sungai di wilayah perkotaan lainnya di Sumatera Utara.

Penggunaan air tanah sebagai sumber air minum telah menjadi kegiatan perusahaan pengelola air minum di Kota Medan. Walau kandungan air tanah masih tersedia relatif cukup, jika kondisi ini berjalan terus maka dapat diprediksikan pada tahun 2010, Kota Medan akan mengalami krisis air tanah. Sebagai gambaran penggunaan air tanah, berdasarkan data pada tahun 2000 tercatat 1.179 perusahaan menggunakan sumur bor berkedalaman 90 meter hingga 200 meter di kota Medan, sedangkan pengguna sumur bor yang berkedalaman di bawah 90 meter berjumlah ribuan di Kota Medan. Sehingga jika masyarakat Kota Medan tidak dapat hemat dalam penggunaan air dan juga tidak peduli terhadap kelestarian hutan (pengatur tata air), tidak mustahil akan mengalami krisis air bersih lebih cepat dari yang diprediksikan.

Kondisi Irigasi di Sumatera Utara sudah cukup memprihatinkan baik dalam arti Luasan yang tersebar pada daerah satuan wilayah sungai yang lebih kurang 421.734 hektar, tersebar di satuan wilayah sungai (SWS) Wampu-Besitang, SWS Belawan-Belumai-Ular, SWS Bah Bolon, SWS Barumon, dan SWS Batang Gadis-Batang Toru dan wilayah sungai lainnya. Kerusakan yang terjadi juga terdapat pada sebagian besar konstruksi sistim irigasi yang ada.

Gambaran kerusakan yang terjadi pada sistim irigasi dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.15.
Luas Daerah Irigasi Sumatera Utara Menurut Kondisi

Kondisi Daerah Irigasi	Luas
Total Luas Daerah Irigasi Provinsi	88.773 Ha
Luas Daerah Irigasi dalam kondisi rusak ringan	26.630 Ha
Luas Daerah Irigasi dalam kondisi rusak berat	23.949 Ha
Total Luas Daerah Irigasi Rawa Provinsi	64.339 Ha
Luas Daerah Irigasi Rawa dalam kondisi rusak ringan	37.844 Ha
Luas Daerah Irigasi Rawa dalam kondisi rusak berat	12.615 Ha

Sumber : Dinas Pengairan Provsu

Tabel 2.16.
Data Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi

URAIAN	YANG ADA							Yang Belum Ada (Kekurangan)
	Jumlah	BAIK			RR (Rusak Ringan)	RB (Rusak Berat)	RT (Rusak Total)	
		Stabil	Rawan Rusak	Jumlah				
JARINGAN PEMBAWA								
a. Saluran Induk (m)	292.269	144.185	65.698	209.883	64.386	18.000		0
- Tanah (m)	209.467	92.075	51.932	144.007	47.460	18.000		0
- Pasangan/Tbk. Pasangan (m)	82.802	52.110	13.766	65.876	16.926	-		51.932
b. Saluran Sekunder (m)	472.752	226.690	103.540	330.230	125.642	16.880		0
- Tanah (m)	419.089	188.240	99.084	287.324	114.885	16.880		0
- Pasangan/Tbk. (m)	53.663	38.450	4.456	42.906	10.757	-		99.084

<i>Pasangan</i>									
c. Bangunan Utama (Bendung, Free Intake) (Bh)	73	9	0	9	51	5	7	0	
d. Bangunan Pembawa/Pelindung/Pengatur (Bh)	2.825	1.766	234	2.000	728	97	0	1.724	
JARINGAN PEMBUANG									
a. Saluran Pembuang (m)	133.160	53.350	25.540	78.890	39.954	14.316		0	
b. Bangunan Pembuang (Bh)	268	150	38	188	53	27		324	
Jumlah Daerah Irigasi (Bh)	67								
Luas Total Areal Irigasi (Ha)	88.773								

Sumber : Dinas Pengairan Provsu

Daerah Irigasi yang memerlukan Rekonstruksi Bendung (Rusak Total) :

1. Daerah Irigasi Balangka Sitongkan (Tapsel)
2. Daerah Irigasi Siborna (Tapsel)
3. Daerah Irigasi Sigarbus (Tapsel)
4. Daerah Irigasi Mambang Boru (Tapteng)
5. Daerah Irigasi Pekan Dolok (Deli Serdang)
6. Daerah Irigasi Pekan Kemis (Deli Serdang)
7. Daerah Irigasi Paya Labu (Deli Serdang)

Tabel 2.17.
Target Perbaikan/Penanganan Jaringan Irigasi 2009 s/d 2013 :

URAIAN	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
JARINGAN PEMBAWA					
a. Saluran Induk					
- Normalisasi Saluran (m)	5.370	8.500	8.500	8.500	8.500
- Pasangan/Tbk. Pasangan (m)	3.850	5.700	5.700	5.700	5.700
b. Saluran Sekunder					
- Normalisasi Saluran (m)	4.250	11.250	11.250	11.250	11.250
- Pasangan/Tbk. Pasangan (m)	2.620	3.800	3.800	3.800	3.800
c. Bangunan Utama (Bendung, Free Intake) (Bh)	0	2	3	4	4
d. Bangunan Pembawa/Pelindung (Bh)	32	60	60	60	60
JARINGAN PEMBUANG					
a. Saluran Pembuang (m)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
b. Bangunan Pembuang (Bh)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pengairan Provsu

Tabel 2.18.
Data Kondisi Daerah Rawa Kewenangan Provinsi

URAIAN	YANG ADA				Yang Belum Ada (Kekurangan)
	Jumlah	Baik	RR (Rusak Ringan)	RB (Rusak Berat)	
Jaringan Pembawa/ Pembuang (m)	485.594	291.350	97.124	97.120	145.670
Tanggul Banjir (m)	86.685	46.085	24.300	16.300	62.850
Bangunan-Bangunan Rawa (m)	274	180	65	29	24
Jumlah Daerah Rawa (Bh)	36				
Luas Total Areal Rawa (Ha)	64.339				

Sumber : Dinas Pengairan Provsu

Tabel 2.19.
Target Perbaikan/Penanganan Jaringan Rawa 2009 s/d 2013 :

URAIAN	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Perbaikan Jaringan Pembawa/ Pembuang (m)	38.100	40.000	40.000	40.000	40.000
Perbaikan Tanggul Banjir (m)	2.090	3.500	3.500	3.500	3.500
Bangunan-Bangunan Rawa (m)	2	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pengairan Provsu

Masalah banjir merupakan masalah yang sudah sangat mengancam di Sumatera Utara, baik yang berada di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Penyebabnya adalah akibat luapan air sungai yang dapat tiba-tiba terjadi pada saat hujan, karena hutan di hulu sungai sudah berkurang dan juga bisa karena tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Sebagai gambaran mengenai berkurangnya kemampuan resapan air di hulu sungai adalah bahwa hutan di hulu Sungai Deli sekarang hanya 3.655 hektar, atau tinggal 7,59% dari 48.162 hektar areal DAS Deli. Padahal, dengan luas 48.162 hektar, panjang 71,91 kilometer (km), dan lebar 5,58 km, DAS Deli seharusnya memiliki hutan alam untuk kawasan resapan air sedikitnya 30% dari luas DAS.

Di daerah perkotaan Medan terjadi genangan banjir rutin tahunan di antaranya, di kawasan Jalan Titi Papan mulai persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gajah Mada, Jalan Kasuari, Jalan Sisingamanga Raja, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Abdullah Lubis, dan Jalan Mansyur, di Kelurahan Sungai Mati, Kelurahan Aur, Kelurahan Jati serta Labuhan Deli.

Luas daerah yang kritis untuk terjadi banjir di wilayah pedesaan lebih kurang 592.000 hektar, tersebar di satuan wilayah sungai (SWS) Wampu-Besitang, SWS Belawan-Belumai-Ular, SWS Bah Bolon, SWS Barumun Kualah, SWS Batang Gadis-Batang Toru, Sungai Bahorok, Sungai Aek Bolon, dan Sungai Asahan.

Tabel 2.20.
Data Kondisi Infrastruktur Pengendalian daya rusak air Provinsi Sumatera Utara

No	NAMA KABUPATEN/KOTA	S a t u a n	YANG ADA										YANG DIBUTUHKAN (BELUM ADA)	
			Tanggul Banjir					Perkuatan Tebing					Tanggul Banjir	Perkuata n Tebing
			JLH	B	RR	KRITIS/ RAWAN	JLH	B	RR	RB				
1	Langkat	m	75.800	41.690	15.160	18.950	5.880	5.630	250					4.830
2	Binjai	m	-	-	-	-	2.590	2.460	130	0				1.960
3	Karo	m	-	-	-	-	1.150	1.030	120					1.400
4	Deli Serdang	m	35.600	17.800	12.460	5.340	5.200	4.940	260					4.900
5	Medan	m	-	-	-	-	8.520	8.370	150					4.270
6	Serdang Bedagai	m	45.400	22.700	15.890	6.810	4.600	4.480	120					2.310
7	Tebing - Tinggi	m	-	-	-	-	1.200	1.125	75			7.500		1.330
8	Dairi	m	-	-	-	-	4.930	4.825	105					2.450
9	Pak-Pak Bharat	m	-	-	-	-	550	550	-					1.050
10	Simalungun	m	-	-	-	-	1.220	1.220	-					1.540
11	Pematangsiantar	m	-	-	-	-	420	420	-					1.100
12	Asahan	m	47.600	9.520	16.660	21.420	3.240	3.080	160			50.000		4.060
13	Batu Bara	m	85.200	42.600	29.820	12.780	3.080	2.930	150					2.940
14	Tanjungbalai	m	12.000	2.400	4.200	5.400	520	520	-					980
15	Labuhan Batu	m	65.600	32.800	22.960	9.840	2.480	2.405	75			15.000		3.150
16	Labuhan Batu Utara	m	-	-	-	-	2.055	1.955	100					2.590

17	Labuhan Batu Selatan	m	-	-	-	-	-	-	-	-	1.220	-	-	-	2.200
18	Toba Samosir	m	22.500	12.375	4.500	5.625	3.780	3.655	125	-	-	-	-	-	3.570
19	Samosir	m	-	-	-	-	3.190	3.190	-	-	-	-	-	-	4.200
20	Humbahas	m	-	-	-	-	1.100	975	125	-	-	-	-	-	2.000
21	Tapanuli Utara	m	10.800	5.940	2.160	2.700	4.800	4.550	250	-	-	-	-	-	2.450
22	Tapanuli Tengah	m	22.000	13.200	7.700	1.100	3.300	1.100	220	1.980	-	-	-	-	2.450
23	Sibolga	m	-	-	-	-	1.700	1.700	-	-	-	-	-	-	600
24	Tapanuli Selatan	m	-	-	-	-	2.990	2.870	120	-	-	-	-	-	3.360
25	Pdg. Sidempuan	m	-	-	-	-	1.645	1.645	-	-	-	-	-	-	1.900
26	Padang Lawas	m	-	-	-	-	1.320	1.320	-	-	-	-	-	-	1.400
27	Padang Lawas Utara	m	-	-	-	-	1.410	1.410	-	-	-	-	-	-	1.600
28	Mandailing Natal	m	-	-	-	-	1.700	1.700	-	-	-	-	30.000	-	3.220
29	Nias Selatan	m	-	-	-	-	5.150	5.030	120	-	-	-	-	-	2.940
30	Nias	m	-	-	-	-	12.450	12.285	165	-	-	-	-	-	2.380
	JUMLAH	m	422.500	201.025	131.510	89.965	93.390	88.590	2.820	1.980	102.500	2.820	1.980	102.500	75.130

Keterangan :
 Sungai di Provinsi Sumatera Utara
 • Induk Sungai = 99 bh
 • Anak Sungai = 783 bh
 • Ranting Sungai = 659 bh
 • Anak Ranting Sungai = 343 bh
 Total = 1.884 bh

Tabel 2.21.
Target Perbaikan/Penanganan Infrastruktur Pengendalian daya rusak air
2009 s/d 2013

URAIAN	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pengamanan tebing sungai/Pantai (m)	9.683	10.500	10.500	10.500	10.500
Normalisasi alur sungai akibat penyempitan (m)	5.607	9.500	9.500	9.500	9.500
Perbaikan dan Pembuatan Tanggul Banjir (m)	14.020	15.250	15.250	15.250	15.250
Bangunan sungai lainnya (bh)	0	2	1	1	0

Sumber : Dinas Pengairan Provsu

2.4.2. Sarana dan Prasarana Perhubungan

2.4.2.1. Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

Kelancaran sistim transportasi baik untuk barang maupun penumpang ditentukan oleh kualitas manajemen transportasi yang mempertimbangkan beberapa faktor seperti ;

- Kontrol beban dan pengaturan gandar kendaraan untuk menjaga terpeliharanya mutu jalan.
- Stasiun angkutan umum dan sistim pembayaran retribusi.
- Menghindari kemacetan lalu lintas.
- Ijin Trayek, dll untuk mengatur pemerataan berusaha dan mengontrol distribusi pelayanan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dari masing-masing aspek disebut di atas pemerintah menyediakan fasilitas berupa alat timbang yang berfungsi untuk mengontrol beban maksimum yang diijinkan bila melalui ruas jalan tertentu untuk menjaga terpeliharanya kualitas struktur jalan. Peralatan timbang dimaksud ditempatkan dibeberapa lokasi dengan tujuan dapat secara efisien menangani wilayah yang diprioritaskan berdasarkan volume trafik di Sumatera Utara (Tabel 2.10)

Tabel 2.22.
Data Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara

No.	Nama UPPKB	Lokasi	Merk Pesawat	Kapasitas	Bangunan	Tanah
1.	Gebang	Jl. Medan-P.Brandan Km. 68,8 Gebang	Digital Electronic	40 ton	180,80 m ²	1.483,65 m ²
2.	Doulu	Jl. Doulu Kec. Tiga Panah (Kab.Karo)	Digital Electronic	40 ton	144 m ²	2.200 m ²
3.	Tanjung Morawa I	Jl. Medan-Tjg.Morawa Km. 15,5 Deli Serdang	Digital Electronic	40 ton	161 m ²	1.600 m ²
4.	Tanjung Morawa II	Jl. Medan-Tjg.Morawa Km. 22 Deli Serdang	Digital Electronic	40 ton	193 m ²	1.300 m ²

5.	Dolok Estate	Jl. Medan-Kisaran Km.122 Asahan	Digital Electronic	40 ton	129,25 m ²	4.000 m ²
6.	Aek Kanopan	Jl. Medan-R.Prapat Km.22 Labuhan Batu	Pretles type 3x16 m	60 ton	288 m ²	1800 m ²
7.	Dolok Merangir	Jl.Medan-P.Siantar	Digital Electronic	40 ton	70 m ²	1.600 m ²
8.	Simpang Runding	Jl. Medan-Bts Aceh Km. 151 Dairi	Digital Electronic	40 ton	117 m ²	504 m ²
9.	Simpang Dua	Jl. Medan-Parapat Km.132 P.Siantar	Digital Electronic	50 ton	51,75 m ²	360 m ²
10.	PAL XI	Jl. Medan-P.Sidempuan Km. 476 Tapsel	Digital Electronic	40 ton	500 m ²	750 m ²
11.	Jembatan Merah	Jl. Medan-Bts.Sumbar Km.572 Madina	Digital Electronic	40 ton	68,2 m ²	1.800 m ²
12.	Aek Batu	Jl. Raya Kota Pinang Km.10,2 Labuhan Batu	Digital Electronic	40 ton	140,5 m ²	9.000 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

Untuk mengatur penumpang sehingga tidak naik dan turun disembarang tempat dan sebagai tempat pergantian moda transport diperlukan stasiun.

Secara umum stasiun yang ada di Sumatera Utara telah difungsikan tapi belum berfungsi seperti diharapkan. Pengaturan jalur - jalur di dalam stasiun belum tertib. Pemeliharaan terhadap peralatan didalam gedung dan kebersihannya masih mengecewakan. Kondisi ini mengurangi minat sebagian masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Dimana pada hakekatnya bila penggunaan angkutan umum dapat digalakkan menjadi suatu sistim pengangkutan yang representatif akan dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan yang pada gilirannya akan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.

Tabel 2.23
Data Terminal Bus di Sumatera Utara

No	Terminal	Kab/Kota	Tipe	Luas (m ²)	Kapasitas
1	Amplas	Medan	A	26.580	80 Bus, 300 MPU
2	Pinang Baris	Medan	A	19.940	50 Bus, 200 MPU
3	Sitinjo	Dairi	A	30.000	30 Bus, 200 MPU
4	Sarantama	P.Siantar	A		
5	Bandar Kajum	T.Tinggi	A	30.000	40 Bus, 200 MPU
6	Tarutung	Tap. Utara	A	40.000	30 Bus, 1.000 MPU
7	Kisaran	Asahan	A	50.000	50 Bus, 100 MPU
8	Penyabungan	Madina	A	18.000	100 MPU
9	Rantau Prapat	Lab.Batu	B	40.000	50 Bus, 200 MPU
10	Sibolga	Sibolga	B	10.954	32 Bus, 65 MPU
11	Lubuk Pakam	Deli Serdang	B	10.000	40 Bus, 100 MPU
12	Kabanjahe	Karo	B	1.500	20 Bus, 150 Angdes
13	Sosorsaba	Simalungun	B		

14	Perdagangan	Simalungun	B		
15	Ikan Paus	Binjai	B	16.000	20 Bus, 50 MPU
16	Bohorok	Langkat	B	10.000	30 Bus, 70 MPU
17	Pasar X /Tjg. Pura	Langkat	B	7.500	35 Bus, 150 MPU
18	Selesai	Langkat	B	12.000	40 MPU
19	Tanjung Beringin	Langkat	B	20.000	30 Bus, 100 MPU
20	Siborong-Borong	Humbahas	B	6.500	20 Bus, 50 MPU
21	Sibolga	Sibolga	B	11.000	30 Bus, 50 MPU
22	Batu Nadua	P. Sidempuan	B	18.000	20 Bus, 150 MPU
23	Aek Kanopan	Lab. Batu	B	10.800	5 Bus, 50 MPU
24	Pajak Tavip	Binjai	C	15.000	100 MPU
25	Gunung Sitoli	Nias	C		
26	Pangururan	Samosir	C		
27	Asahan	Asahan	C	1.925	20 Bus, 60 MPU
28	Sijambi	T. Balai	C	22.000	50 Bus, 100 MPU
29	Sidikalang	Dairi	C		60 Bus, 200 MPU
30	Berastagi	Karo	C		
31	Serbelawan	Simalungun	C		
32	Dolak Masihul	Sergei	C	1.507	20 Bus, 50 MPU
33	Perbaungan	Sergei	C	2.000	20 Bus, 60 MPU
34	Pancur Batu	Deli Serdang	C	10.000	45 MPU
35	Deli Tua	Deli Serdang	C		
36	Sambu	Medan	C	2.500	1500 MPU
37	Veteran	Medan	C	2.000	20 Bus, 60 MPU
38	Wiliem Iskandar	Medan	C	4.500	75 MPU
39	Belawan	Medan	C	420	30 Bus
40	P. Brandan	Langkat	C	6.400	40 Bus

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

Kemacetan lalu lintas bisa disebabkan antara lain karena ketidak teraturan pemakaian jalan dan juga panjang jalan yang tersedia tidak cukup menampung volume kendaraan yang ada. Jumlah kendaraan yang beroperasi di Sumatera Utara terdiri dari kendaraan yang berdomisili di Sumatera Utara dan juga kendaraan pengunjung dari luar provinsi. Sebagai gambaran jumlah kendaraan roda empat termasuk sepeda motor yang berdomisili di Sumatera Utara, berdasarkan data yang ada pada tahun 2005 berjumlah 2.285.404 unit.

Tabel 2.24.
Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar

Tahun	Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Jumlah
2001	169.741	128.985	26.035	952.361	1.177.122
2002	180.521	26.566	135.838	1.084.051	1.426.976
2003	192.596	27.106	144.233	1.300.995	1.664.930
2004	207.614	27.621	154.420	1.568.048	1.957.703
2005	226.043	28.160	166.221	1.864.980	2.285.404

Sumber : Ditlantas Poldasu / SUDA 2006

Dengan jumlah kendaraan seperti tersebut di atas agar mengurangi kemacetan lalu lintas memerlukan suatu pengaturan baik dari sisi kesesuaian fungsi masing-masing jenis kendaraan dengan persyaratan performanya, dimana ketidaksesuaiannya akan berakibat pada ketidak sempurnaan kemampuan manuvernya yang akhirnya dapat menimbulkan hambatan lalu lintas bahkan dapat menimbulkan kecelakaan.

Kondisi perkeretaapian dapat digambarkan dengan keberadaan jaringan KA mulai dari Pangkalan Susu ke Rantau Prapat sepanjang 377 KM. Stasiun besar kereta api berada di kota Medan dengan kondisi fasilitas yang dianggap masih belum memadai jika transportasi KA akan dijadikan suatu sistem pengangkutan yang diunggulkan di Sumatera Utara. Kecelakaan KA yang terjadi di Sumatera Utara umumnya disebabkan oleh masih rendahnya standar pengamanan dan rendahnya kualitas rel KA serta sistem pendukung operasional lainnya. Kondisi rel KA di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel

Tabel 2.25.
TIPE REL DAN KONDISINYA

No.	Lintas	Panjang Lintas (M'Sp)	Type Rel
1.	Medan - Tanjungbalai	1.000	R.42
		97.000	NP.34
		55.739	R.42
		20.703	NP.25
2.	Kisaran - Rantau Prapat	19.800	R.42
		8.400	NP.34
		85.720	R.42
3.	Tebing Tinggi - Pematangsiantar	500	NP.34
		47.967	R.25
4.	Medan - Kuala	700	R.42
		40.706	R.25
5.	Binjai - Pangkalan Brandan	65.915	R.25
6.	Pangkalan Brandan - Besitang	14.990	R.25
7.	Besitang - Halaban	10.365	R.42
8.	Medan - Belawan	1.100	R.42
		20.507	R.25

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

Pada hakekatnya peran KA sebagai salah satu moda transport darat cukup besar. Pada saat hari-hari besar pengangkutan KA sudah terbukti sangat membantu meringankan beban penggunaan jalan raya. Sesuai data jumlah penumpang, sejak H-10 hingga H-3 lebaran sedikitnya sebanyak 22.156 pemudik telah diberangkatkan dari Medan. Puluhan ribu pemudik itu diangkut menggunakan Kereta Putri Deli untuk kelas ekonomi dan Kereta Sri Bilah untuk kelas bisnis dan eksekutif dengan frekuensi keberangkatan total 10 kali per hari. Rute Kereta Sri Bilah mengangkut penumpang untuk rute Medan-Rantau Parapat sebanyak empat kali dan Medan-Binjai dua kali, lalu Kereta Putri Deli mengangkut penumpang rute Medan-Tanjungbalai dua kali dan Medan-Tanjungbalai/ Pematangsiantar satu kali.

Di samping sebagai sistem pengangkutan penumpang, peran KA untuk pengangkutan komoditas terutama Crude Palm Oil (CPO) cukup potensial, karena dengan sistem transportasi KA, selain biaya transportasi bisa ditekan, kecepatan, dan keamanan dari gangguan juga dinilai lebih

menjanjikan. Di samping itu dengan lebih mengutamakan KA dari pada menggunakan truk tangki sebagai sistim pengangkutan komoditi tersebut akan dapat mengurangi resiko kerusakan jalan raya dan kemacetan lalu lintas. Hanya saja, mobilitas angkutan CPO dari jalan raya ke jalan rel dan sistim angkutan yang kompatibel dengan pengapalannya merupakan suatu permasalahan tersendiri. Masalah ini yang mungkin menjadi penyebab kurang optimalnya penggunaan transportasi KA untuk mengangkat CPO. Namun untuk mendukung kelancaran ekspor dari Sumatera Utara dibutuhkan suatu terobosan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan KA sebagai sistim pengangkutan CPO dan komoditi ekspor lainnya.

Sejalan dengan upaya mencari solusi untuk dapat memanfaatkan KA sebagai sistim transportasi utama, rencana pembangunan pelabuhan darat (dry port) dapat menjadi suatu solusi yang tepat.

Tabel 2.26.
KM. PENUMPANG DAN TON KM BARANG ANGKUTAN KERTA API

Tahun	Kilometer Penumpang	Barang (Ton Kilometer)		
		Hasil Perkebunan	B B M	Lain-lain
2001	473.858.877	38.196.613	26.475.826	21.498.614
2002	410.833.245	56.670.817	24.002.955	28.428.002
2003	445.814.009	88.604.711	26.431.256	26.710.798
2004	423.964.833	107.519.485	28.616.308	18.675.075
2005	351.703.880	105.915.171	28.292.164	11.383.732

Sumber : PT. KAI Divisi Regional I Sumut/Aceh

2.4.2.2. Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut

Di Sumatera Utara terdapat Pelabuhan Belawan yang merupakan pelabuhan terbesar diluar pulau Jawa yang berfungsi sebagai pintu gerbang perekonomian Sumatera bagian Utara melalui angkutan laut dan beberapa pelabuhan perintis yang strategis dan potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan dan perkembangan perekonomian di Sumatera Utara diantaranya Pelabuhan Sarang Elang di Kabupaten Labuhan Batu, Pelabuhan Inalum di Kabupaten Batubara dan Labuhan Angin di Tapteng.

Masalah yang masih terjadi di pelabuhan Belawan adalah bahwa sering terjadi kapal dari berbagai jenis terpaksa harus antre di Pelabuhan Belawan karena proses bongkar muat memakan waktu panjang. Hal ini bisa terjadi diakibatkan oleh fasilitas pelabuhan yang masih sangat minim. Di samping itu, pada saat-saat puncak panjang dermaga belum dapat menampung volume kapal yang singgah di pelabuhan pada empat dermaga yaitu Ujung Baru, Belawan Lama, Terminal Peti Kemas, dan Citra. Alur pelayaran Pelabuhan Belawan juga sering mengalami sedimentasi sehingga menjadi lebih dangkal sehingga diperlukan pengerukan alur pelayaran secara reguler.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum ketersediaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas fasilitas yang mendukung sistim operasional pelabuhan di Sumatera Utara masih belum memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan yang berkaitan dengan angkutan penumpang maupun ekspor dan impor barang.

Kondisi Belawan sebagai suatu wilayah perkotaan, yang belum tertata dengan baik, berpotensi untuk menambah permasalahan dalam kelancaran kegiatan pelabuhan. Karena kegiatan masyarakat kota menjadi campur baur dengan kegiatan kepelabuhanan.

Sejalan dengan perkembangan potensi hinterland dan tuntutan operasional serta perkembangan teknologi angkutan laut yang cenderung melakukan perdagangan dunia serta sejalan dengan kebijakan regional/nasional, perlu dilakukan penataan Belawan sebagai pelabuhan bertaraf internasional dan sekaligus sebagai *waterfront city* dengan mempertimbangkan Belawan sebagai bagian dari program pengembangan Metropolitan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang).

Tabel 2.27.
PELABUHAN LAUT DAN KEWENANGAN PUSAT

No	Pelabuhan	Panjang Dermaga (m)	Gudang (Luas m ²)	Lapangan Penumpukan (Luas m ²)	Terminal	
					Luas (m ²)	Kapasitas (orang)
1	Belawan	4.193,00	74.142,00	196.511,00	3.577,00	3.100,00
2	Tanjungbalai	344,00	3.820,00	6.125,00	645,00	450,00
3	Sibolga	243,50	2.900,00	5.589,00	250,00	250,00
4	Gunung Sitoli	145,00	600,00	1.000,00	200,00	200,00
5	Kuala Tanjung	80,00	-	-	-	-
6	Pangkalan Susu	30,50	-	-	-	-
7	Tanjung Leidong	121,00	200,00	1.200,00	100,00	100,00
8	Sei. Berombang	140,00	-	-	-	-
9	Tanjung Sarang Elang	70,00	-	1.000,00	200,00	200,00
10	Lahewa	70,00	200,00	-	100,00	100,00
11	Pulau Tello	143,00	400,00	763,00	100,00	100,00
12	Teluk Dalam	170,00	200,00	450,00	400,00	400,00
13	Natal	82,50	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

Tabel 2.28.
PELABUHAN LAUT DAN KEWENANGAN PROVINSI

No.	Pelabuhan	Panjang Dermaga (m)	Gudang (Luas m ²)	Lapangan Penumpukan (Luas m ²)	Terminal	
					Luas (m ²)	Kapasitas (orang)
1	Pangkalan Dodek	-	-	-	-	-
2	Tanjung Beringin	20,00	-	9.850,00	100,00	100,00
3	Tanjung Pura	-	-	-	-	-
4	Tanjung Tiram	26,70	-	-	-	-
5	Teluk Nibung	-	-	-	-	-
6	Pantai Cermin	-	-	-	-	-
7	Rantau Panjang					
8	Afulu					
9	Sirombu	41,00	-	-	-	-
10	Barus	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

Tabel 2.29.
Pelabuhan Laut dan Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	NAMA PELABUHAN	KAB/ KOTA	DERMAGA (UNIT)	GUDANG (UNIT)	LAPANGAN PENUMPUKAN (UNIT)	TERMINAL PNP (UNIT)
1	Perupuk	D. Serdang	-	-	-	-
2	Sialang Buah	D. Serdang	-	-	-	-
3	Pulau Kampai	Langkat	-	-	-	-
4	Tapak Kuda	Langkat	-	-	-	-
5	Kuala Serapuh	Langkat	-	-	-	-
6	Pantai Labu	D. Serdang	-	-	-	-
7	Percut	D. Serdang	-	-	-	-
8	Ajamu	Lab. Batu	-	-	-	-
9	Gajah Mati	Lab. Batu	-	-	-	-
10	Labuhan Bilik	Lab. Batu	-	-	-	-
11	Sei Kubung	Lab. Batu	-	-	-	-
12	Simandulang	Lab. Batu	-	-	-	-
13	Pantai Pukat	Lab. Batu	-	-	-	-
14	Sikara-Kara	Madina	-	-	-	-
15	Tabuyung	Madina	-	-	-	-
16	Singkuwang	Madina	-	-	-	-
17	Hinako	Nias Selatan	-	-	-	-
18	Lagundri	Nias Selatan	-	-	-	-
19	Lahusa	Nias Selatan	-	-	-	-
20	Lehelewau	Nias Selatan	-	-	-	-
21	Pulau Bais	Nias Selatan	-	-	-	-
22	P. Tanah Masa	Nias Selatan	-	-	-	-
23	Sigolo-golo	Nias Selatan	-	-	-	-
24	Solonako	Nias Selatan	-	-	-	-
25	Tuhemberua	Nias	-	-	-	-
26	Labuhan Hiu	Tapteng	-	-	-	-
27	Moale	Nias	-	-	-	-
28	Manduamas	Tapteng	-	-	-	-
29	Muara Tapus	Tapteng	-	-	-	-
30	Batahan	Tapteng	-	-	-	-
31	Pangkalan Brandan	Langkat	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

2.4.2.3. Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara

Sistim transportasi udara didukung oleh keberadaan bandara Polonia yang merupakan bandara internasional berfungsi sebagai pusat penyebaran primer yang memiliki cakupan yang luas dan berperan penting sebagai sub sistem dalam sistem transportasi nasional. Melihat perkembangan jumlah penumpang pesawat yang menggunakan Bandara Polonia terus meningkat

secara pesat, pembangunan Bandara pengganti yaitu Bandara Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang telah mulai dilaksanakan. Beberapa bandara perintis juga tersedia yaitu Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Dr.F.L Tobing di Tapanuli Tengah, Aek Godang di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Bandara Lasondre di Pulau-pulau Batu, Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara serta Bandara Sibisa di Kabupaten Toba Samosir yang belum beroperasi secara optimal.

Kondisi bandara perintis yang tidak beroperasi secara optimal cenderung akan cepat mengalami kerusakan khususnya lapisan permukaan landasan dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Terlebih bandara perintis yang dalam kondisi *unattended aerodrome* membuat fungsi perawatan bandara menjadi sangat lemah. Melihat posisi dari bandara-bandara perintis, distribusi pelayanan udara untuk wilayah Sumatera Utara sudah cukup memadai karena sudah tersedia di wilayah Pantai Barat, wilayah tengah (dataran tinggi), namun penggunaannya masih perlu dioptimalkan. Operator penerbangan ke bandara perintis dilayani oleh perusahaan penerbangan Merpati, dan maskapai penerbangan lainnya.

Rute penerbangan perintis yang disubsidi pemerintah berdasarkan Keputusan dengan Nomor : SKEP/246/XII/2007 tentang Rute Penerbangan Perintis Tahun Anggaran 2008 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada tanggal 17 Desember 2007 hanya rute Gunung Sitoli - Pulau-pulau Batu, pp dan Pulau-pulau Batu - Padang, pp.

Tabel 2.30.
DATA BANDAR UDARA I

NO	URAIAN	POLONIA	BINAKA	FL. TOBING
1.	Lokasi	1 Km dari Medan	22 Km dari Gn. Sitoli	30 Km dari Sibolga
2.	Luas Area	144 HA	72 HA	183,03 Ha
3.	Aeorodrome Elevation	26,5 m	6 m	10 m
4.	Runway	2.900 x 45 m	1.400 x 30 m	1.850 x 30 m
5.	Luas Apron	A = 29.860 m ² B = 30.305 m ² C = 16.028 m ²	60 x 80 m	90 x 50 m
6.	Kapasitas Apron	A = 2 B-747s, 1 A-300 B = 2 A-300s, 2 B-737s C = 18 CN-212/Helly	1 F-27, 2 CN-212	1 F-27, 2 CN-212
7.	Terminal Penumpang	13.096 m ² (dom & int'l)	416 m ² (dom)	620 m ² (dom)
8.	Luas Areal Parkir	Dom = 15.805 m ² Int'l = 10.531 m ²	1.500 m ²	620 m ²
9.	Kapasitas Parkir	Dom =300, Int'l = 200 mbl	30 mobil	30 mobil
10.	Kargo	PT. NATS, PT. MSA	-	-
11.	Peralatan Navigasi	NDB, VOR, DME, ILS	NDB, VOR	NDB
12.	Aircraft Visual Aid Equipment	VASI/ R/W Light, REIL, Approach Light	Threshold Light	-
13.	Pemadam Kebakaran	Category VIII	Category IV	Category III
14.	Air Traffic Services	Radar, Approach, ADC	Unattended Aerodrome	Unattended Aerodrome

Sumber : PT. (Persero) Angkasa Pura-II, Bandara Polonia Medan

Tabel 2.31.
DATA BANDAR UDARA II

No	URAIAN	AEK GODANG	LASONDRE	SIBISA	SILANGIT
1.	Lokasi	30 Km dari P.Sidimpuan	3 Km dari P.Tello	19 Km dari Parapat	30 Km dari Tarutung
2.	Luas Area	117 HA	35 HA	40 Ha	353.894 m ²
3.	Aeorodrome Elevation	281 m	2 m	1,218 m	1,237 m
4.	Runway	1.400 x 23 m	1400 x 30 m	750 x 23 m	1850 x 23 m
5.	Luas Apron	32,5 x 58,5 m	60 x 40 m	60 x 40 m	60 x 40 m
6.	Kapasitas Apron	2 CN-212	2 CN-212	1 CN-212	1 CN-212
7.	Terminal Penumpang	200 m ² (dom)	100 m ² (dom)	70 m ² (dom)	100 m ² (dom)
8.	Luas Areal Parkir	250 m ²	-	50 m ²	180 m ²
9.	Kapasitas Parkir	10 mobil	-	3 mobil	6 mobil
10	Kargo	-	-	-	-
11	Peralatan Navigasi	NDB	NDB	-	-
12	Aircraft Visual Aid Equipment	-	-	-	-
13	Pemadam Kebakaran	Category IV	Category I	-	-
14	Air Traffic Services	Unattended Aerodrome	Unattended Aerodrome	Unattended Aerodrome	Unattended Aerodrome

Sumber : PT. (Persero) Angkasa Pura-II, Bandara Polonia Medan

Tabel 2.32.
JUMLAH PENUMPANG PESAWAT UDARA MELALUI BANDARA POLONIA

Tahun	Internasional			Domestik		
	Datang	Berangkat	Transit	Datang	Berangkat	Transit
2001	257.159	248.475	-	459.810	494.442	20.706
2002	296.186	291.176	-	740.385	740.160	22.611
2003	287.693	294.657	-	1.056.888	1.065.908	31.186
2004	380.712	382.637	-	1.505.082	1.509.224	35.931
2005	395.264	419.333	-	1.538.938	1.603.387	100.491

Sumber : PT. (Persero) Angkasa Pura-II, Bandara Polonia Medan

2.4.2.4. Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Potensi angkutan sungai dan danau sampai saat ini masih belum tereksplorasi dengan baik, padahal angkutan ini adalah sistem angkutan tradisional yang ampuh di pedalaman. Dalam pengembangan wilayah, transportasi ini merupakan salah satu perintis yang dapat diandalkan tanpa banyak mengeluarkan biaya pemerintah.

Sumatera utara merupakan wilayah yang mempunyai relatif banyak sungai dan di wilayah ini pula terdapat Danau yang cukup besar yaitu Danau Toba. angkutan danau adalah angkutan yang sangat tua umurnya. Namun sekarang sistem angkutan danau sudah sangat ketinggalan. Prasarana dan sarana angkutan / danau telah terabaikan bertahun-tahun lamanya telah menjadi sangat memprihatinkan, sehingga kualitas pelayanan angkutan Danau sudah sangat rendah. Keberadaan sistem angkutan Danau pada jaman dahulu sudah terbukti sangat menolong seluruh kegiatan keseharian masyarakat lokal. Sehingga revitalisasi sistem angkutan danau merupakan suatu kebutuhan yang vital. Sehingga sudah saatnya untuk mengembangkan posisi angkutan Danau di danau Toba secara tepat dan proporsional.

Tabel 2.33.
Kondisi Dermaga Angkutan Danau dan Penyeberangan
di kawasan Danau Toba

No.	Nama Dermaga	Luas Dermaga		Konstruksi	Keterangan
		Lantai (m ²)	Areal (m ²)		
1	Tongging	200	400	Beton	- Peningkatan (APBN 2003) - Terminal (APBN 2004) - Pos Jaga (2003)
2	Haranggaol	250	630	Kayu	- Rehab (APBN 2006)
3	Tigaras	200	635	Beton	- Peningkatan (APBN 2003) - Rehab (APBN 2007)
4	Tigaraja	268,70	3.200	Beton	- Pembangunan (APBN 2002) - Pemb. Ged. Ops UPT ASDP (APBD 2006)
5	Ajibata	162	900	Beton	- Peningkatan Dermaga dan Talud 1.606 M2 (APBN 2003) - Pembangunan (APBN 2004) - Peningkatan (APBN 2006)
6	Tomok	270	480	Beton	- Peningkatan (APBN 2003)
7	Ambarita	225		Beton	- Pembangunan (APBN 2006)
8	Simanindo	-	2.800	Beton	- Rehab (APBN 2007)
9	Pangururan	368	1.500	Beton	- Pembangunan (APBN 2005)
10	Nainggolan	100	240	Kayu	- Rehab (APBN 2006)
11	Onan Runggu	60	157,5	Beton	- Peningkatan (APBN 2006)
12	Balige	98	774	Beton	- Pembangunan (APBN 1997/98)
13	Muara	450	452	Beton	- Pembangunan (APBN 1999) - Rehab (APBN 2007)
14	Mogang	70	450	Kayu	
15	Bakkara	175	450	Beton	- Pembangunan (APBN 2004)
16	Silalahi	-	450	Beton	

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

Tabel 2.34.
Kondisi Dermaga Angkutan Danau dan Penyeberangan
di kawasan Danau Toba

No.	Kecamatan	Jumlah (Unit)
1.	Balige	9
2.	Onang Runggu	10
3.	Onang rungu Timur	14
4.	Palipi	39
5.	Simanindo	46
6.	Pangururan	10
7.	Harian	28
8.	Sianjur Mula-Mula	16
9.	Ajibata	10
10.	Lumban Julu	7
11.	Porsea	2
Jumlah		189

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

2.4.3. Kondisi Kelistrikan dan Gas

Kebutuhan listrik daerah Sumut dipasok dari 8 Unit Pembangkit yang dioperasikan oleh

PLN Pembangkitan Sumbagut. Daya terpasang pembangkit sebesar 1.250 MW, dimana suplai tenaga listrik terbesar berasal dari PLTGU Belawan yang terletak di Pulau Naga Putri Sicanang dengan daya terpasang sebesar 1077,9 MW. Daya mampu sistem listrik Sumut saat ini sekitar 1150 megawatt (MW), dengan beban puncak 995 MW sehingga cadangan listrik tersisa ini jauh di bawah cadangan aman. Bahkan perkembangan pada saat krisis yang terjadi pada kondisi normal mengalami defisit hingga mencapai 120-150 MW sedangkan ketika *overhaul* mencapai 320 MW, akibatnya telah terjadi peningkatan waktu padam hingga mencapai empat jam sehari secara bergilir, sehingga semakin menyebabkan menurunnya produktivitas dunia usaha utamanya kalangan mikro, kecil dan menengah.

Namun dengan akan beroperasinya PLTU Labuhan Angin dengan kapasitas 115 MW diharapkan akan dapat mengisi kekosongan cadangan ini. Namun meski tertutupi, PLN belum memiliki cadangan daya listrik yang cukup sehingga jika ada pemeliharaan jaringan, masih bisa terjadi pemadaman bergilir.

Untuk menyalurkan listrik agar sampai ke pelanggan, PLN juga mengoperasikan 3.295,4 Kms jaringan transmisi tegangan tinggi dan gardu induk berkapasitas 2.175 Mva kelolaan PLN P3B Sumatera - Unit Pengatur Beban Sumbagut. Dengan rencana pembangunan beberapa pembangkit listrik baru, krisis listrik baru bisa diatasi bila PLN Wilayah Sumut bisa mengoperasikan PLTA Asahan I dengan kapasitas 2x90 MW dan mulai masuk sistem Sumut pada akhir 2010.

Mengenai kondisi sumber daya gas sebagai pembangkit listrik, 36 Million Metric Square Cubic Fee Per Day (MMSCFD) yang berasal dari wilayah Pertamina EP Sumbagut, 24 MMSCFD disalurkan ke PT. PLN untuk pembangkitan energi listrik dan 12 MMSCFD untuk sektor industri melalui PT. PGN Medan. Dengan kondisi tersebut PT. PLN kekurangan sekitar 50 MMSCFD sehingga harus digantikan dengan BBM, saat ini 70% energi primer PT. PLN menggunakan BBM sedangkan sektor industri kekurangan sekitar 12 MMSCFD sehingga sebahagian industri mengurangi bahkan berhenti berproduksi.

Berdasarkan hasil komputasi oleh tim pakar, dengan asumsi adanya pertumbuhan kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk, walau dengan semua rencana penambahan seluruh pembangkit listrik baru, Sumatera Utara masih akan menghadapi defisit pada tahun 2018.

2.4.4. Telekomunikasi

Pada saat ini dalam era globalisasi dimana informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia informasi sangat penting. karena informasi mempunyai nilai-nilai ekonomi, kemampuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi mutlak dimiliki suatu daerah untuk memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk mewujudkan daya saing. Penyediaan prasarana telekomunikasi dalam bentuk koneksi *fix telephone*, keberadaan TV Nasional baik Pemerintah dan Swasta secara relay, maupun dengan kehadiran TV lokal telah memberikan kemudahan akses terhadap informasi. Juga beberapa operator penyedia jasa hubungan internet telah memberikan pelayanan koneksi internet yang terus meningkat kualitasnya.

Namun keberadaan seluruh fasilitas komunikasi ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal terlihat dari minimnya kesadaran masyarakat secara umum baik dari kalangan masyarakat awam maupun masyarakat usaha yang pada hakekatnya sangat memerlukan teknologi komunikasi khususnya koneksi internet untuk mendukung kegiatan usahanya.

2.4.5. Pengembangan Wilayah

2.4.5.1 Perumahan dan Permukiman

Ketersediaan rumah yang sehat dan layak huni serta terjangkau terutama perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap belum dapat diselenggarakan secara menyeluruh oleh pemerintah. Masih banyak masyarakat yang menetap pada kawasan yang tidak

layak huni dan dalam hal ini mengakibatkan kawasan-kawasan kumuh berakibat kepada penurunan kualitas lingkungan, sosial, perekonomian dan keamanan.

Untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni serta terjangkau, pemerintah telah melibatkan para stakeholders guna membangun perumahan dan permukiman yang sesuai dengan daya beli masyarakat, antara lain melalui Program Pengembangan Kualitas Permukiman (PKP); Pengembangan Kasiba dan Lisiba; Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan; Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan dan Perkotaan termasuk di dalamnya Rusunawa dan Rusunami, Perumahan KORPRI, dan RSH (Rumah Sangat Sederhana), Pengembalian Fungsi Kawasan Permukiman melalui Peremajaan di Metropolitan.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah dan kurangnya perumahan dengan kualitas permukiman yang layak huni terutama permukiman masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap memerlukan kemantapan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman termasuk kelembagaan pengawasan dan keselamatan bangunan. Demikian juga diperlukan pemantapan sistem dan mekanisme pembiayaan termasuk sistem subsidi, pemanfaatan sumber pendanaan.

Sebagai upaya pemenuhan akan perumahan masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun ini segera akan membangun 1000 unit Rumah Sederhana Sehat (RSH) Type 36 untuk Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi anggota KORPRI Provinsi Sumut.

2.4.5.2 Perkotaan dan Perdesaan

Kegiatan ekonomi dan sosial di Provinsi Sumatera Utara secara garis besar terkonsentrasi di wilayah pantai timur, sedang bagian tengah, pantai barat, dan kepulauan di sekitar provinsi ini, tingkat perkembangan wilayah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya relatif tertinggal. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah ini lebih lambat dari wilayah lainnya sehingga mengakibatkan bertambahnya kesenjangan antar wilayah. Dengan demikian, tantangannya adalah meningkatkan pengembangan wilayah yang tertinggal tersebut dengan menyerasikan laju pertumbuhan perkotaan di wilayah-wilayah yang masih ketinggalan agar menjadi pusat pertumbuhan untuk mendorong perekonomian di wilayah tersebut sehingga dapat mengurangi kesenjangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran antar wilayah di provinsi ini.

Dalam konteks pembangunan wilayah untuk pusat pertumbuhan secara regional, Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) sedang merancang pengembangan kawasan perkotaan Metropolitan Medan - Binjai - Deliserdang dan Kabupaten Karo (Mebidangro).

Rancangan tersebut antara lain mencakup rencana pembangunan jalan tol Medan - Binjai dan Tanjung Morawa - Kuala Namu - Tebing Tinggi, pengelolaan kawasan sekitar daerah aliran sungai (DAS) dari hulu di kabupaten Karo hingga ke hilir untuk menanggulangi resiko banjir, pengembangan pelabuhan Belawan, pembangunan dan pemanfaatan jaringan rel kereta api sebagai sarana angkutan barang dan angkutan penumpang, pembangunan infrastruktur energi dan kelistrikan, pengembangan kawasan industri di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, pembangunan sarana transportasi angkutan umum massal, pembangunan bandara baru di Medan di Kuala Namu sebagai pengganti bandara Polonia dan rencana pengembangan kawasan Central Business District (CDB) di Medan.

Kawasan perdesaan juga dikembangkan melalui konsep agropolitan terutama di wilayah dataran tinggi Bukit Barisan, demikian juga konsep agromarineopolitan dikembangkan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara. Konsep ini diharapkan dapat mensinkronkan dan menterpadukan pembangunan/pengembangan perdesaan dan perkotaan serta mengurangi kesenjangan antar wilayah tersebut.

2.4.5.3. Tata Ruang

Kondisi tata ruang banyak dipengaruhi oleh belum finalnya proses penyesuaian Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara yang sedang dikaji ulang dan revisi khususnya pada masalah hutan dan kawasan hutan. Sehingga menimbulkan ketidaksinkronan antara RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi. Demikian pula terjadinya pemekaran daerah mendorong meningkatnya pemanfaatan ruang, berakibat pada terjadinya alihfungsi kawasan. Untuk itu diperlukan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kebutuhan akan perlunya percepatan Pembangunan Kawasan Tertinggal dan penyelesaian masalah perbatasan membuat perlunya suatu penyesuaian dan evaluasi terhadap tata ruang yang ada. Hal ini disebabkan perlunya pengembangan diversifikasi kegiatan ekonomi pedesaan, perluasan akses terhadap sumber daya produksi dan pasar, serta kepada pengembangan system agribisnis berbasis pengembangan wilayah atau yang dikenal dengan kawasan agropolitan. Dalam proses penyesuaian dan evaluasi, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, selalu mengacu pada kebijaksanaan hirarki perencanaan (RTRW Nasional, RTRW Pulau, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota) sebagai pola koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

2.4.5.4 Lingkungan Hidup

Permasalahan Lingkungan Hidup, Kualitas lingkungan terus menurun yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah akibat kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pertanian yang belum terkendali.

Kualitas Udara semakin menurun sejalan dengan peningkatan sarana transportasi dan pembangunan industri serta masih banyaknya jumlah titik api (Hot Spot) akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi lahan semakin mengkhawatirkan dengan indikator semakin berkurangnya luas kawasan hutan dan meningkatnya ketandusan (lahan kritis) akibat aktivitas dibidang kehutanan dan perkebunan yang kurang memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan terutama di daerah pedesaan. Sementara di daerah perkotaan penurunan kondisi lahan berkaitan dengan pengelolaan kebersihan (sampah), penataan estetika yang belum maksimal. Kawasan pantai mengalami penurunan kualitas dengan indikator menurunnya luas hutan bakau (mangrove).

2.5. Urusan Pemerintahan Provinsi

Urusan Pemerintahan Provinsi yang menjadi kewenangan provinsi Sumatera Utara terdiri dari 31 urusan terdiri dari 23 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan wajib tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika dan ketahanan pangan. Sedangkan urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan ketransmigrasian.

Urusan wajib dan urusan pilihan dimaksud di atas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008.

2.6 Profil Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

2.6.1. Jumlah PNS/Non PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

PNS	=	10.915	Orang
Non PNS	=	1.068	Orang

- 2.6.2. Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Kelamin
 Pria = 7.513 Orang
 Wanita = 3.402 Orang
- 2.6.3. Jumlah Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan eselon
 Eselon I = 1 Orang ;
 Eselon II = 74 Orang ;
 Eselon III = 349 Orang ;
 Eselon IV = 1.097 Orang
- 2.6.4. Jumlah PNS Fungsional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 Jumlah PNS Fungsional = 1388 Orang
- 2.6.5. Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Golongan /Kepangkatan

Tabel 2.35.
Jumlah PNS Pemerintah Propvinsi Sumatera Utara Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Golongan	I	=	144	Org
Golongan	II	=	2.531	Org
Golongan	III	=	7.778	Org
Golongan	IV	=	662	Org
Total		=	10.915	Org

Sumber: BKD Provsu

- 2.6.6. Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

Tabel. 2.36.
Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

SD	=	347	Org
SLTP	=	408	Org
SLTA	=	5614	Org
Sarjana Muda/ D3	=	764	Org
S1	=	3362	Org
S2	=	412	Org
S3	=	5	Org

Sumber: BKD Provsu

2.7. Kerjasama Daerah

2.7.1. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten/Kota SeSumatera Utara

Untuk mengurangi kesenjangan antar sektor, antar kabupaten dan antar kota dan desa, pemerintah daerah telah melakukan berbagai kebijakan secara menyeluruh dan terpadu termasuk meningkatkan alokasi dana langsung ke daerah, di samping itu untuk melanjutkan dan meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan serta menggerakkan kembali kegiatan ekonomi di

berbagai daerah secara merata.
Kerjasama Antar Kabupaten/Kota

1. Kerjasama Pembiayaan Transportasi Udara

Sejak tahun 2003 telah dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota sekawasan Pantai Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang membiayai subsidi operasional penerbangan Suteria I dengan rute penerbangan : Medan - Gunung Sitoli PP, Medan - Sibolga PP, Medan - Aek Godang PP dan Medan - Silangit PP. Sebagai operator penerbangan adalah PT. Merpati Nusantara Airlines. Dalam waktu yang relatif tidak lama, untuk rute Medan - Gunung Sitoli PP, dan Medan - Sibolga PP, tidak perlu lagi di subsidi, atau telah komersil sepenuhnya.

Agar pelayanan publik dibidang transportasi udara lebih meningkat, tahun 2006 Bappedadu memfasilitasi kerjasama antara Kabupaten/Kota dengan maskapai penerbangan PT. Asi Pujiastuti Aviation (Susi Air) agar penerbangan dapat dilakukan setiap hari untuk rute Medan - Aek Godang PP, Medan - Silangit PP dan Medan - Sibisa PP. Kabupaten/Kota yang turut serta dalam kerjasama ini adalah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Toba Samosir dan Nias.

2. Kerjasama Pembangunan Jalan / Jembatan

- a. **Kerjasama MEBIDANG**
Pembangunan Jalan Sejajar Medan - Binjai
Kerjasama yang telah dirintis sejak Tahun 2002 adalah kerjasama pembangunan Jalan Sejajar Medan - Binjai. Kerjasama ini adalah Cost Sharing antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemko Medan, Pemkab Deli Serdang dan Pemko Binjai. Kota Binjai telah merealisasikan pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya sampai perbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.
- b. **Kerjasama Pembangunan Jembatan Tanjung Selamat**
Kerjasama ini melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Dalam kerjasama ini telah disepakati bahwa untuk pembangunan konstruksi fondasi jembatan di wilayah Medan dibangun oleh Pemko Medan dan fondasi jembatan di wilayah Deli Serdang dibangun oleh Pemkab Deli Serdang, sedangkan rangka penghubung dan pengaspalan jembatan merupakan tanggung jawab Pemprovsu.
- c. **Kerjasama Pembangunan se- Kawasan Danau Toba Jalan Tanjung Morawa - Saribudolok - Tongging (RAWASARING).**
 - Kerjasama Pembangunan Jalan "RAWASARING" melibatkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat. Tujuan pembangunan Jalan RAWASARING ini adalah untuk mempersingkat jarak tempuh antara kawasan pesisir Pantai Timur dengan Kawasan Dataran Tinggi Bukit Barisan, utamanya untuk mendukung pelaksanaan program Agropolitan dan Agromarine Politan sekaligus mempermudah akses jalan ke DTW Danau Toba.
 - Kepala Bappedadu bersama-sama dengan 3 (tiga) Kepala Bappeda (Deli Serdang, Karo dan Simalungun) telah mempresentasikan rencana kerjasama ini ke Bappenas dan Dirjen Bina Marga PU. Departemen PU telah menyetujui pelaksanaan "Feasibility Study" nya dengan dana APBN bersama dengan rencana pembangunan Outer Ring Road Danau Toba.
- d. **Kerjasama Pembangunan Outer Ring Road (ORR) Danau Toba.**
Kerjasama pembangunan Outer Ring Road (ORR) Danau Toba melibatkan 7 (tujuh) Kabupaten se kawasan Danau Toba (Simalungun, Tobasa, Taput, Humbahas, Samosir, Dairi dan Karo). Kerjasama ini juga telah mempresentasikan di Bappenas dan Departemen PU - RI di Jakarta pada tahun 2006. Pihak Departemen PU telah menyetujui pelaksanaan Feasibility Study dengan sumber dana APBN.

3. Kerjasama Peningkatan Pelabuhan Teluk Nibung di Kota Tanjungbalai dan Pelabuhan Bagan Asahan di Kabupaten Asahan.
4. Kerjasama Agropolitan dan Agromarinepolitan

Tujuan kerjasama Program Agropolitan dan Agromarine Politan adalah menciptakan sistem pertanian modern dan terpadu di Sumatera Utara. Kerjasama ini melibatkan kabupaten di kawasan Dataran Tinggi Bukit Barisan.

Kerjasama Program Agromarine Politan bertujuan untuk mengembangkan kawasan pesisir Pantai Timur dan Pantai Barat menjadi suatu kawasan "Water Front" yang maju dan modern. Kerjasama Agromarine Politan melibatkan 18 (delapan belas) kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera Utara.

5. Kerjasama Promosi Daerah Tujuan Wisata Danau Toba

Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan jumlah kunjungan Wisata Mancanegara ke Provinsi Sumatera Utara khususnya ke Daerah Tujuan Wisata Danau Toba, dengan cara mempromosikannya melalui informasi dari majalah. Kerjasama ini melibatkan 8 (delapan) Kabupaten se Kawasan Danau Toba dengan pihak perusahaan Mass-Media (Inside Sumatera Magazine)

Pada Musrenbang Forum SKPD Kerjasama dan Lintas Wilayah tahun 2008 menghasilkan kesepakatan usulan-usulan yang akan dikerjasamakan

Program kerjasama pada tahap proses adalah :

- Kerjasama Pengelohan TPA Regional terpadu (Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang, Kab.Sergei/Kota Tebing Tinggi-Kab.Tapteng/Kota Sibolga/Kabupaten Tapanuli Selatan/Kota Padangsidempuan.
- Kerjasama Pemanfaatan Bandara Silangit antara Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbahas, Kabupaten Tobasa dan Kabupaten Samosir dengan PT. Riau Airlines.
- Kerjasama pengembangan Dry Port di Kota Tebing Tinggi.
- Kerjasama pengembangan perikanan di Pantai Barat Sumatera Utara (seaweed).

6. Kerjasama Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak Berat/Ringan dan Meubelair Gedung SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMK, SMLB Negeri dan Swasta, Dalam Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Deli Serdang.

Maksud perjanjian kerjasama ini untuk memperbaiki gedung sekolah/madrasah yang rusak, sebagai bentuk pelayanan yang layak dalam memenuhi standar nasional pendidikan.

Tujuan dari perjanjian ini adalah :

- a. Mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dengan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan

Penandatanganan Kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2006.

2.7.2 Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi lainnya.

Melakukan Kerjasama di Beberapa Bidang Sebagai Berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Sumatera

Mendorong Pemerintah/ Kementrian/ Lembaga dalam upaya kerjasama pembangunan Infrastruktur lintas Provinsi/ Pulau Sumatera melalui berbagai sumber pembiayaan pembangunan, antara lain Jaringan Rel Kereta Api Trans Sumatera, Jalan Tol dan Trans

Sumatera Lintas Timur, Barat, Tengah, dan pembangunan Pelabuhan Samudera di wilayah Sumatera.

2. Pengembangan Energi Listrik Wilayah Sumatera

Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan masalah krisis energi di Wilayah Sumatera antara lain melalui deregulasi terhadap kebijakan di bidang kelistrikan guna memudahkan investor swasta untuk berpartisipasi dalam menyediakan daya dan menyelesaikan backbone jaringan transmisi yang menghubungkan setiap Provinsi di Sumatera.

3. Pengembangan Badan Usaha Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah Sumatera.

- a. Mengoptimalkan peranan Sumatera Promotion Centre (SPC) yang disinergikan dengan Sumatera On-line melalui pembayaran iuran bersama untuk mendukung operasionalisasi kegiatan PT. SPC.
- b. Mewujudkan berdirinya Sumatera Airlines melalui penyertaan modal dari seluruh Provinsi yang dioperasikan oleh Riau Airlines sebagai pemegang saham utama.
- c. Mendukung pengembangan usaha PT. Sumatera Shipping Lines melalui tambahan penyertaan modal dari seluruh Provinsi sehingga menjadi perusahaan pelayaran yang besar.

4. Kerjasama Pendidikan Tinggi meliputi :

- a. Mengembangkan keunggulan masing-masing universitas yang ada di Sumatera untuk menjadi Centre of Excelent secara bertahap.
- b. Mengupayakan agar dana APBN dialokasikan lebih besar ke sektor pendidikan tinggi di Wilayah Sumatera.
- c. Mengadakan kerjasama dalam penerimaan mahasiswa melalui jalur khusus bagi lulusan SLTA se Wilayah Sumatera yang berprestasi.
- d. Menyediakan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu se Wilayah Sumatera.

5. Menyelesaikan secara tuntas batas antar Provinsi secara musyawarah dalam tahun 2008.

6. Illegal Logging, Illegal Mining dan Illegal Fishing penanganannya dilaksanakan masing-masing instansi terkait bersama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dalam rangka mengatasi rendahnya penyerapan anggaran pembangunan di Daerah, diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri RI penerbitan Peraturan Presiden untuk adanya luncuran proyek-proyek yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan dan mempermudah proses pencairan dana.

8. Meminta kepada Pemerintah untuk merevisi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 untuk memperjelas pembagian kewenangan antara Gubernur dan Bupati/Walikota dan mengatur masalah Pilkada dan UU tersendiri.

Program Kerjasama Yang Telah Dilaksanakan

A. Program Bersama Gubernur Se-Wilayah Sumatera

- 1) Pembangunan Gedung PT. Sumatera Promotion Center untuk mempromosikan kondisi dan potensi masing-masing Provinsi (Koordinator Pemerintah Provinsi Riau)
- 2) Pengembangan Sumatera Online sebagai portal informasi resmi masing-masing provinsi yang tergabung kedalam backbone Sumatera (Koordinator Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)

- 3) Pendirian PT. Sumatera Shipping Lines yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi/barang penumpang antar Provinsi se wilayah Sumatera sampai ke Malaysia dan Singapura (Koordinator Pemerintah Provinsi Jambi)
- 4) Pendirian PT. Sumatera Airlines bekerjasama dengan PT. Merpati Nusantara Airlines untuk membuka akses antar wilayah se-Sumatera tanpa melalui Jakarta (Koordinator Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)

B. Kerjasama Pemerintah Provinsi se-Wilayah Sumatera yang pendanaannya diusulkan ke Pemerintah Pusat

- 1) Tata Ruang Wilayah Sumatera menghasilkan rancangan beberapa kesepakatan diantaranya Sumatera Trans Railway dan Jaringan Interkoneksi Listrik se-Sumatera. (Koordinir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)
- 2) Pengembangan Kereta Api Wilayah Sumatera untuk membuka akses jaringan kereta api dari Aceh sampai ke Lampung (Koordinator Pemerintah Provinsi Lampung)
- 3) Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Timur, Tengah, dan Barat serta Feeder Road ditujukan untuk menata kerjasama pembangunan jalan lintas barat, tengah, timur dan feeder road se - Wilayah Sumatera (Dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu)
- 4) Pembangunan Jaringan Interkoneksi dan Pembangkit Listrik Sumatera. Program ini telah menghasilkan keputusan agar masing-masing Provinsi menyampaikan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUDK) kepada Provinsi Sumatera Barat sebagai Koordinator. Masing-masing Provinsi membuat kajian tarif regional seperti yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk ditawarkan kepada investor.
- 5) Sistem Pengamanan Laut dan Pesisir untuk menangani masalah pengamanan Illegal Fishing
- 6) Pengelolaan DAS dan Lingkungan untuk menangani masalah penambangan liar, Illegal Logging dan masalah Taman Nasional.

2.7.3. Kerjasama Luar Negeri

A. Kerjasama regional segitiga pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand (Indonesia - Malaysia - Thailand - Growth Triangle).

Kerjasama IMT-GT dibentuk pada tahun 1993, pada awal terbentuknya hanya terdiri dari 12 Provinsi/Negara Bagian yakni 4 Provinsi Indonesia, 3 Negara Bagian Malaysia dan 5 Provinsi Thailand, saat ini telah menjadi 32 Provinsi/Negara Bagian yakni 10 Provinsi Indonesia (semua provinsi di Sumatera), 8 Negara Bagian Malaysia dan 14 Provinsi Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa forum ini telah diakui dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya.

Kerjasama ekonomi sub regional ini dilandasi oleh beberapa landasan dasar yang bersifat strategis dan sejalan pula dengan dasar-dasar yang sehat dari proses liberalisasi ekonomi dan perdagangan yakni :

1. Kedekatan geografis dari wilayah negara-negara anggota.
2. Komplementaris faktor produksi antar wilayah
3. Peran dunia usaha (private sektor) sebagai penggerak pembangunan
4. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Secara struktural mekanisme kerjasama IMT-GT terbagi dalam 2 (dua) tingkatan yaitu Sidang Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting - SOM) dan Business Council Meeting (BCM). SOM terdiri dari pejabat-pejabat tinggi pemerintah dari departemen dan lembaga terkait serta anggota teras BCM. Sedangkan BCM terdiri dari pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam IMT-GT.

SOM melakukan pertemuan setahun sekali yang didahului pertemuan BCM. Hasil pertemuan BCM kemudian diajukan ke SOM. Dalam pertemuan-pertemuan di bahas berbagai hal yang dihadapi oleh kerangka kerjasama IMT-GT meliputi bidang Pertanian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pariwisata, Transportasi, Teknologi, Telekomunikasi, Perdagangan dan

Hubungan Udara. Sampai saat ini telah ditandatangani 74 (tujuh puluh empat) MOU dan beberapa diantaranya sudah terealisasi.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Presiden No. 184 Tahun 1998 pada tanggal 20 Oktober 1998 tentang tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional. Peraturan tersebut bertujuan meningkatkan dan mengkoordinasi secara efektif dan efisien Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR).

Pada awalnya KESR IMT-GT dilengkapi dengan beberapa Working Group sebagai Mekanisme Kerja. Pada pertemuan ke-8 SOM di Songkhla dibentuklah Task Force menyusun Proposal on Strategic Approach to Repositioning on IMT-GT. Setelah melalui tiga kali pertemuan di Bangkok, Langkawi dan Medan dihasilkan beberapa keputusan yang disampaikan pertemuan SOM di Medan Juli 2001 antara lain :

1. Developing the Seamless Songkhla - Penang - Medan Economic Corridor, koridor ekonomi bebas hambatan Songkhla - Penang - Medan merupakan the overriding objective dari upaya menuju ke repositioning IMT-GT.
2. Diwujudkankannya 6 (enam) Bentuk Kerjasama
 - Infrastructure Development or the Landbridge
 - In-situ Development of Which the Border Wholesale Market is an example
 - Open Market Operation as in the Special telecommunication Zone
 - Sectoral Development as in Tourism Development
 - Cross Sectoral such as Human Resource Development, and
 - Development of Hinterland areas located close or linked to the economic corridor
3. Pembentukan Implementing Technical Group (ITG) dengan tetap mempertahankan working group karena peranan pemerintah masih tetap dibutuhkan, namun perlu diadakan peninjauan kembali mengenai struktur dan mekanismenya.
The Implementing Technical Group :
 - ITG Landbridge Project (6 sub-ITGs possible)
 - ITG Common Border Wholesale Market
 - ITG Special Telecommunication Zone
 - ITG Tourism, Sectoral
 - ITG Hinterland Development
 - ITG Cross Sectoral

Institusi Utama pada IMT-GT

Berikut ini adalah peran dan tugas pokok yang penting pejabat pemerintahan di IMT-GT dan lembaga swasta dalam melaksanakan Program IMT-GT:

Pertemuan Sidang Pemimpin/Kepala Negara (Leaders' Summit)

- Merupakan Lembaga Tertinggi dalam pengambilan keputusan pada IMT-GT;
- Pengarah utama yang menentukan arah tujuan dan dasar bagi kerjasama IMT-GT.

Pertemuan Tingkat Menteri - Ministerial Meeting (MM)

- Merupakan Lembaga Tinggi Kedua yang melakukan koordinasi, mengarahkan, mengatur dan pengambilan keputusan dalam tubuh IMT-GT, dan melaporkan kepada Leader Summit
- Mekanisme untuk menyampaikan laporan resmi mengenai kemajuan pelaksanaan Roadmap, diskusi tingkat tinggi atau pelaksanaan kebijakan dan isu-isu penting yang harus menjadi perhatian pada Leaders' Summit.

Pertemuan Pejabat Senior - Senior Official Meeting (SOM)

- Merupakan badan yang melakukan koordinasi dan melaporkan hasilnya kepada Ministerial Meeting;

- Menyiapkan dan menyampaikan laporan ke MM tentang kemajuan pelaksanaan Roadmap;
- Melaporkan kepada MM tentang isu-isu yang memerlukan tindakan yang lebih tinggi dari pihak berwenang;
- Koordinasi, pengawasan terhadap IMT-GT Working Group

Kelompok Kerja (Working Groups)

- Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama IMT-GT dan tindakan yang akan dilaksanakan pada masing-masing daerah, yang menjabat sebagai convenors terutama dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menentukan dan melaksanakan langkah-langkah ini;
- Menyusun program kerja berdasarkan rencana strategis yang telah disetujui pada Roadmap dan secara berkala meninjau pelaksanaan IMT-GT tindakan untuk memastikan bahwa ini adalah konsisten dengan arah strategis dalam Roadmap;
- Memfasilitasi identifikasi dan prioritas pelaksanaan program dan proyek-proyek di daerah masing-masing dan secara berkala melakukan review terhadap proyek-proyek ini;
- Bekerja sama dengan Joint Business Council dalam meningkatkan partisipasi aktif dari kalangan swasta di kegiatan Working Groupnya;
- Memfasilitasi diskusi dan resolusi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan proyek;
- Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan WG.

Pusat Kerjasama Subregional IMT-GT (CIMT)

- Pelaporan ke SOM, berfungsi sebagai lembaga untuk memantau dan koordinasi kegiatan IMT-GT pada sektor publik;
- Perantara antara SOM / MM dan lainnya instansi IMT-GT serta dengan IMT-GT mitra eksternal;
- Membawa, memimpin dalam koordinasi informasi dalam IMT-GT;
- Memfasilitasi konsultasi dengan IMT-GT stakeholder untuk mengumpulkan masukan, mempersiapkan, memvalidasi, dan secara berkala menganalisa IMT-GT Roadmap;
- Memfasilitasi kegiatan subregional IMT-GT untuk mendukung pelaksanaan Roadmap, bekerja sama dengan Kelompok Kerja, Sekretariat Nasional, Dewan Bisnis Bersama (JBCs), dan lembaga IMT-GT lainnya;
- Memonitor kemajuan pelaksanaan Roadmap dan menyampaikan langkah-langkah dan melaporkan kepada SOM / MM, WGs, dan lembaga IMT-GT lainnya;
- Koordinator aliran informasi di antara berbagai lembaga IMT-GT dan eksternal dengan mitra dalam mendukung pelaksanaan Roadmap;
- Perantara dan koordinator IMT-GT hubungan dan kegiatan dengan Sekretariat ASEAN, ASEAN badan, lembaga-lembaga multilateral lainnya, dan mitra organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Roadmap.

Secretariat Nasional

- Menyajikan informasi dari CIMT kedalam negeri masing-masing, koordinasi di semua sektor publik-negara untuk setiap kegiatan IMT-GT
- Melakukan koordinasi dengan negara-anggota, koordinasi dengan sekretariat nasional IMT-GT, CIMT, JBC, dan badan IMT-GT lainnya;
- Memfasilitasi semua dalam kegiatan-negara dari sektor publik dan swasta dalam pembahasan tentang IMT-GT, advokasi untuk mendukung kebijakan dan program IMT-GT, perencanaan dan program dari dalam negeri, partisipasi dalam IMT-GT, dan pelaksanaan Roadmap;
- Menyajikan database untuk negara IMT-GT lainnya yang berhubungan dengan data dan mengkoordinasi aliran informasi di antara negara-badan IMT-GT;
- Memonitor perkembangan IMT-GT dan menindaklanjuti kesepakatan yang memerlukan keputusan tingkat negara;
- Memberikan dukungan teknis dan layanan administrasi untuk negara IMT-GT mengkoordinasikan anggaran operasional dan persyaratan untuk tujuan ini.

Dewan Bisnis Bersama (Join Business Council/JBC)

- Berfungsi sebagai counterpart sektor swasta, pemerintah dan lembaga IMT-GT;
- Mengatur hubungan dan kerjasama ekonomi antara sektor usaha organisasi dalam IMT-GT, dan mewakili pada pembahasan dan program, dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan kerja sama subregional;
- Melakukan peran advokasi untuk kebijakan, program, proyek-proyek dan menerapkan aturan-aturan dan pedoman mendukung peningkatan partisipasi swasta di bidang bisnis dan kegiatan pembangunan di IMT-GT;
- Memulai identifikasi proyek IMT-GT komersial dan berpartisipasi dalam identifikasi kunci persyaratan infrastruktur IMT-GT.

Forum Gubernur

- Berfungsi sebagai promotor dan fasilitator dari proyek IMT-GT di masing-masing daerah (pemerintah daerah);
- Berkoordinasi dengan JBC, MM, dan Som WGs untuk mempromosikan IMT-GT proyek di daerah masing-masing;
- Memfasilitasi resolusi kebijakan, peraturan, masalah dan hal-hal lain yang mempengaruhi implementasi IMT-GT proyek di daerah masing-masing;
- Berpartisipasi dan memberikan masukan dalam perencanaan dan program dari investasi publik yang terletak di wilayah masing-masing untuk mendukung IMT-GT

Keanggotaan Provinsi Sumatera Utara Dalam Forum IMT-GT

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang paling berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand yang langsung berada di pinggir jalur pelayaran Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Provinsi Sumatera Utara tergabung dalam forum kerjasama sub-regional IMT-GT sejak awal terbentuknya kerjasama ini pada tahun 1993 bersama Aceh, Sumatera Barat dan Riau.

Sebagai Provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam dan posisi strategis pada koridor perdagangan Selat Malaka, Sumatera Utara diharapkan dapat memanfaatkan forum kerjasama ini untuk meningkatkan konstribusinya bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya.

Sukses IMT-GT selama 15 tahun terakhir (1993-2008)

Dari hasil kerjasama telah disepakati 46 (empat puluh enam) Memorandum of Understanding (MoU's). Sampai saat ini sektor swasta Sumatera Utara telah menandatangani sebanyak 40 (empat puluh) kesepakatan kerja dengan mitra kerjasama dari Malaysia dan Thailand.

Dari mekanisme pertemuan IMT-GT untuk tingkatan Business Council Meeting (BCM) sampai dengan tahun 1998 terdapat 10 (sepuluh) kelompok kerja (Working Group) yang terdiri dari :

1. Kelompok Kerja Bidang Industri
2. Kelompok Kerja Bidang Telekomunikasi
3. Kelompok Kerja Bidang Perluasan Perhubungan Udara
4. Kelompok Kerja Bidang Perdagangan
5. Kelompok Kerja Bidang Keuangan dan Investasi
6. Kelompok Kerja Bidang Perhubungan Laut dan Transportasi
7. Kelompok Kerja Bidang Pertanian dan Perikanan
8. Kelompok Kerja Bidang Pariwisata
9. Kelompok Kerja Bidang Energi
10. Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja

Pada perkembangan selanjutnya ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dibentuk Working Group kedalam 6 bentuk Working Group yakni :

1. Kelompok Kerja Infrastruktur dan Transportasi (Working Group Infrastructure and Transportation/WGIT)
2. Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi (Working Group Trade and Investment/WGTI)
3. Kelompok Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia (Working Group Human Resource Development /WGHRD)
4. Kelompok Kerja Pertanian, Industri berbasis Agro, dan Lingkungan (Working Group Agriculture, Agro-based Industry, and Environment/WGAEE)
5. Kelompok Kerja Pariwisata (Working Group Tourism/WGT)
6. Kelompok Kerja Halal Produk dan Layanan (Working Group Halal Products and Services/WGHAPAS)

Dari serangkaian kerjasama yang telah dilaksanakan, beberapa kesepakatan telah melahirkan proyek kerjasama diantara ketiga negara. Hasil-hasil yang telah dicapai dan telah dirasakan manfaatnya antara lain :

1. Kebijakan Penghapusan Biaya Fiskal

Penghapusan fiskal yang diberlakukan bagi penduduk yang bepergian ke daerah-daerah yang tergabung didalam forum IMT-GT telah memacu kerjasama antar pebisnis di ketiga kawasan negara-negara anggota IMT-GT. Melalui kerjasama ini dapat dilihat mobilitas masyarakat dan perkembangan Sumber Daya Manusia dalam arti kuantitas dan kualitas, perhubungan udara dan laut, penyeberangan lintas batas, kedatangan turis, pertukaran pelajar, kegiatan pelatihan dan pertukaran pelajar dan banyak lainnya yang telah meningkat secara signifikan.

2. Meningkatnya Mobilitas Manusia dan Barang dari dan ke daerah tujuan yang tergabung ke dalam kawasan IMT-GT

Ketika IMT-GT pertama dicanangkan hanya ada 3 penerbangan dalam seminggu antara Penang dan Medan. Saat ini telah ada 6 penerbangan setiap hari antara Penang dan Medan. Sepuluh tahun yang lalu hanya ada 1 penerbangan yang melayani sub region akan tetapi dewasa ini ada 6 maskapai penerbangan yang beroperasi ke berbagai tujuan di dalam wilayah IMT-GT dengan puluhan kali jadwal penerbangan. Keberadaan ini jelas telah menggerakkan mobilitas masyarakat maupun barang dan jasa didalam kawasan IMT-GT.

Peningkatan ini diikuti dengan peningkatan signifikan dalam jumlah hotel di Medan, Hat Yai dan Sadao sehingga dapat menjadi tujuan utama untuk wisatawan intra-regional dan wisatawan;

Demikian juga terjadi peningkatan penerbangan yang melayani kota-kota di Malaysia (Penang, Kuala Lumpur, Melaka, Langkawi, Ipoh), Indonesia (Medan, Pekanbaru, Batam, Banda Aceh, dan Songkhla (Thailand). Pada saat ini JBC telah memfasilitasi Firefly untuk memulai operasi penerbangan ke Sumatera pada tanggal 26 Oktober 2008 yang melayani rute Penang-Banda Aceh, Penang-Medan dan Subang-Pekanbaru;

3. Peningkatan Investasi di berbagai lapangan usaha.

Sebagai hasil dari lingkungan, IMT-GT telah menciptakan banyak investasi dalam negeri terkait dengan IMT-GT region. Miliaran investasi telah dikeluarkan untuk menambah sarana fisik, human, lingkungan sosial dan infrastruktur pemerintah.

Hingga saat ini diperkirakan telah hampir US\$ 2 milyar modal investasi yang ditanamkan usahawan dari negara Indonesia - Malaysia dan Thailand. Salah satunya yang telah terlaksana adalah disepakatinya MOU investasi di bidang perkebunan pisang dengan pemanfaatan bio-teknologi di Aceh Besar seluas 50.000 hektar dan sudah terealisasi seluas 500 Ha.

Telah dibangun Kabel Optik Bawah Laut antara Semenanjung Malaysia dan Sumatra telah dibangun dengan kerjasama erat antara Indosat (Indonesia) dan Telekom Malaysia Bhd;

Demikian juga telah dibangun IMT-GT Plaza, yang menampilkan produk-produk lokal Indonesia. IMT-GT Plaza telah didirikan yang pertama di Trang, Thailand, dan beberapa lokasi lain di sekitar IMT-GT seperti Bukit Kayu Hitam, Port Dickson, Port Klang, Penang dan Selangor di Malaysia, Dumai, Pekanbaru, Batam dan Medan di Indonesia, Hat Yai dan Krabi di Thailand;

Selain itu terdapat lebih kurang 15 perusahaan kecil tradisional (UMKM) dari produsen makanan dan minuman produk dari Malaysia telah diidentifikasi oleh JBC dan penjualan di supermarket di Medan yaitu Maximart dan Machan Yaohan.

4. Kerjasama Pelayaran telah melahirkan pengoperasian Kapal penumpang "Roro" antara Penang - Belawan yang merupakan kerjasama antara Penang Port Sdn. Bhd dengan PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Kerjasama ini telah memberikan kesempatan yang lebih luas untuk kelancaran arus lalu lintas manusia dan barang melalui laut. Dalam pelaksanaannya Ferry "Roro" ini telah pula melakukan pelayaran Penang - Lhokseumawe (Aceh) sehingga kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya kepada Sumatera Utara dan Penang saja.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Banyak penduduk di wilayah IMT- GT memperoleh manfaat dari investasi dibidang Sumber Daya Manusia yang telah dilaksanakan lebih dari 10 tahun. Sekurang-kurangnya 100.000 orang telah dilatih diberbagai bidang, seperti perawat, konstruksi, pertanian, jasa professional dan bidang lainnya. Angka ini belum termasuk pelatihan yang diberikan untuk pembantu rumah tangga. Thailand juga memperoleh manfaat dari pengetahuan bahasa dan program pelatihan perawat yang diperoleh dari Malaysia. Di Penang fasilitas kesehatan telah diperluas lebih dari 10 tahun untuk memenuhi pertumbuhan penduduk dikawasan IMT-GT yang memerlukan kualitas pelayanan kesehatan.

6. Meluasnya Minat Kerjasama dari beberapa provinsi lain yang bertetangga untuk turut dalam forum kerjasama ini.

Melihat adanya manfaat besar yang dihasilkan dari keberadaan forum kerjasama ini ternyata telah menarik minat dari beberapa provinsi di Indonesia dan Thailand serta negara bagian di Malaysia untuk turut bergabung ke dalam forum ini.

Kalau pada awal terbentuknya hanya terdiri dari 12 Provinsi/Negara Bagian yakni 4 Provinsi Indonesia, 3 Negara Bagian Malaysia dan 5 Provinsi Thailand, saat ini telah menjadi 32 Provinsi/Negara Bagian yakni 10 Provinsi Indonesia (semua provinsi di Sumatera), 8 Negara Bagian Malaysia dan 14 Provinsi di Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa forum ini telah diakui dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

7. Seminar IMT-GT Business and Investment Forum: Agropolitan, Agomarineopolitan/ Low Land Agriculture Perspektif.

Pada pertemuan IMT-GT yang dilaksanakan diagendakan program/ kegiatan yaitu Seminar and Business Forum Agropolitan and Agomarineopolitan di Sumatera Utara pada tahun 2007.

Pada pertemuan bulan Mei 2008 tentang The 2nd Meeting IMT-GT of Working Group on Agriculture, Agrobased Industry and Environment telah pula diagendakan tentang pengembangan rumput laut dan Provinsi Sumatera Utara mempresentasikan Business Profile tentang pengembangan rumput laut dimaksud pada pertemuan the 3rd Meeting

IMT-GT of Working Group an Agriculture, Agrobased Industry and Environment yang akan dilaksanakan di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat.

IMT-GT merupakan pasar yang potensial bagi 80 juta konsumen dengan bertambahnya pendapatan masyarakat yang akan dikonsumsi. Dalam hal ini perlu dipertegas bahwa potensi kerjasama IMT-GT harus ditinjau secara menyeluruh sebagai pasar ekonomi negara yang potensial. Hal ini hanya akan dapat berfungsi bila relasi yang kuat antara sektor swasta maupun pemerintah dapat memfokuskan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Keadaan ini juga dapat dikatakan bahwa IMT-GT secara perlahan masuk kedalam kesatuan "Straits of Malacca Economic Cooperation" entity.

Meluasnya Peran Sektor Swasta

Sejak berdiri pada tahun 1993, dengan kerangka kerjasama IMT-GT telah diakui penting peran serta swasta dalam mempercepat pembangunan subregional. Struktur kelembagaan IMT-GT mencerminkan dual paralel besar dan mekanisme kerja sama di sektor publik dan swasta.

Joint Business Council (JBC) baik di tingkat nasional dan IMT-GT tingkat berfungsi sebagai counterpart swasta, pemerintah dan lembaga IMT-GT. Tugas utamanya adalah untuk membina hubungan dekat dan kerja sama di antara berbagai kepentingan bisnis di IMT-GT dan menjadi pendorong bagi perbaikan di lingkungan yang memungkinkan bagi partisipasi swasta dalam pembangunan IMT-GT.

Sektor swasta berperan utama dalam mengarahkan banyak dari inisiatif IMT-GT. Antara 1995-2005, yang difasilitasi JBC investasi yang diperkirakan US \$ 3,80 miliar nilai proyek-proyek baru di subregion ini. Telah didirikan pasar grosir di sepanjang perbatasan disebut IMT-GT plazas, pusat investasi one-stop, dan pelayaran antar wilayah. JBC juga telah memfasilitasi delegasi perdagangan dan Pameran perdagangan, investasi di perusahaan lokal, dan standarisasi operasi pelabuhan dan pelayanan logistik.

B. Asosiasi Provinsi Bersaudara (Sister Province Association) Sumatera Utara

Asosiasi Provinsi Bersaudara dibentuk dari hasil prakarsa Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan beberapa pihak swasta untuk meningkatkan kerjasama luar negeri Provinsi Sumatera Utara dengan provinsi di negara lain yaitu antara Provinsi Sumatera Utara dengan Negeri Pulau Pinang (Malaysia), Provinsi Songkhla (Thailand) dan Provinsi Guangdong (Republik Rakyat Tiongkok). APB dibentuk melalui SK Gubernur Sumatera Utara Nomor : 193/085 - K/2002 tanggal 26 Maret 2002 untuk Masa Bhakti 2002-2005.

Kerjasama ini meliputi bidang tukar menukar informasi dan tenaga ahli, kerjasama antara pengusaha skala kecil dan menengah, pertanian, perdagangan dan investasi, kerjasama dalam peningkatan teknologi dan informasi, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan. Kesepakatan yang dijalin, telah mendorong kedua belah pihak untuk melakukan saling kunjung mengunjungi untuk lebih mengenal potensi satu sama lain.

Melalui wadah APB telah dapat dijumpai berbagai kerjasama antara lain kerjasama antar Shanghai Fisheries University dengan Pemerintah Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai untuk pengembangan kerjasama di sektor perikanan, dan memfasilitasi terwujudnya pembentukan hubungan bersaudara antara Shanwei dengan Serdang Bedagai dan beberapa kegiatan lainnya.

Pada sektor pembinaan SDM telah dilaksanakan beberapa kali pelatihan antara lain Pelatihan Penanganan Dokumentasi Ekspor - Impor, Sistem pembayaran Perdagangan Internasional.

Untuk kelangsungan organisasi Asosiasi Provinsi Bersaudara, kepengurusan Asosiasi Provinsi Bersaudara Sumatera Utara kemudian dilanjutkan dengan Priode Masa Bhakti 2006-2009 dilantik kembali oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Drs. Rudolf M. Pardede pada melalui SK Gubernur Sumatera Utara Nomor : 193/1657.K/2006 tanggal 21 Juli 2006.

Dalam priode selanjutnya, beberapa program yang menjadi prioritas antara lain adalah peningkatan hubungan dengan mitra APB di luar negeri (Penang, Songkhla dan Guangdong) dengan tindaklanjut hubungan kerjasama dalam berbagai bidang yang menjadi agenda kerjasama, khususnya pada bidang pendidikan, ekonomi dan budaya. Minimnya dukungan dana dari APBD untuk kegiatan lembaga ini juga menjadi kendala dalam meningkatkan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sementara itu, dalam paruh waktu 2008, APB terus berupaya untuk meningkatkah hubungan kerjasama Provinsi Bersaudara dengan Provinsi Songkhla, melalui partisipasi dalam acara Songkhla Food Festival, Songkhla yang berlangsung pada tanggal 16 - 25 Mei 2008. Dalam kegiatan ini APB juga telah menampilkan tim kesenian yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Pengembangan Asosiasi Provinsi Bersaudara kemudian berkembang dengan hubungan kerjasama dengan Provinsi Bekes County, Republik Hungaria yang diprakarsai oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Hungaria Mr. Mangasi Sihombing.

Tujuan pembentukan hubungan kerjasama Provinsi Bersaudara dengan Hungaria adalah untuk mendapatkan manfaat posisi strategis dari Hungaria dikarenakan secara geografis dan geopolitik tergabungnya Hungaria ke dalam MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) merupakan peluang bagi Provinsi Sumatera Utara untuk menjadikan Hungaria sebagai jembatan bagi peningkatan masuknya produk-produk ekspor Sumatera Utara ke Wilayah MEE. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Sumatera Utara untuk dapat memanfaatkan kerjasama ini sehingga menghasilkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan.

Untuk mewujudkan kerjasama tersebut pada tanggal 23 Oktober 2008 telah ditandatangani Lol (Letter of Intent) kerjasama Provinsi Bersaudara antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Bekes County, Republik Hungaria.

Sebagai tindaklanjut dari ditandatanganinya Lol kerjasama Provinsi Bersaudara antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Bekes County, Republik Hungaria, sekaligus untuk memenuhi undangan Gubernur Bekes County, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kunjungan kerja ke Bekes County, Republik Hungaria pada tanggal 8 s/d 12 Mei 2009. Peserta yang melaksanakan kunjungan kerja terdiri dari para Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Walikota Tanjungbalai, Pengurus Asosiasi Provinsi Sumatera Utara, Pengurus Komite Olahraga Nasional (KONI) Sumatera Utara. Delegasi dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Gatot Pujo Nugroho, ST.

Pada pertemuan tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan yakni : pemaparan profil dan potensi Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, khususnya pada bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, antara lain Pariwisata, Pertanian dan Perikanan, Perdagangan dan Industri, Pendidikan dan Sains, Olahraga dan Informasi.

Kunjungan Delegasi Sumatera Utara ini mendapat sambutan hangat dan serius oleh Pemerintah Bekes County dan Dubes RI di Hungaria yang ditandai dengan hadirnya terus menerus langsung Gubernur Bekes County mendampingi rombongan.

Untuk meningkatkan hubungan kerjasama ini diperlukan dasar hukum berupa penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MoU) Kerjasama Provinsi Bersaudara antara

Provinsi Sumatera Utara dan Bekes County agar berbagai kegiatan yang telah diidentifikasi, dapat segera direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Tindaklanjut setelah penandatanganan naskah kerjasama, terdapat peluang untuk melakukan pertemuan bisnis dengan pengusaha kedua Provinsi serta pertemuan antara parlemen, lembaga penelitian dan lembaga terkait lainnya yang diharapkan dapat lebih mewarnai kerjasama Provinsi Bersaudara dengan Bekes County.

Untuk ini diharapkan juga dukungan dari Pemerintah Pusat/Departemen terkait seperti Departemen Pertanian, Departemen Perikanan dan Kelautan, Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga.